

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN

PADA BAITULMAAL MUAMALAT

Business Cases Report MB-KM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Septiana Puja Riani

NIM : 31401900153

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2023

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF FINANCIAL REPORT ON
BAITULMAAL MUAMALAT

Septiana Puja Riani¹, Naila Najihah²

Accounting Bachelor Study Program, Faculty of Economics, Sultan Agung
Islamic University

septianapr@std.unissula.ac.id, naila.najihah@std.unissula.ac.id

ABSTRACT

This Business Cases Report MB-KM entitled Accountability and Transparency of Financial Statements at the Baitulmaal Muamalat as made with the aim of knowing the accountability and transparency of the Baitulmaal Muamalat financial reports that have been presented. This is done by disclosing through measurement indicators based on applicable rules. This research is a research using qualitative methods with data collection techniques using financial report documentation. Data analysis was performed by descriptive analysis.

The results of this study indicate that Baitulmaal Muamalat presents financial reports in an accountable and transparent manner. The basis used as the measurement is PSAK and the Law. However, the financial reports need to adjust terms based on the latest rules. So, it is necessary to update the new rules that apply to minimize misunderstandings to stakeholders as stakeholders in financial statement information. This research resulted in the disclosure of published financial statements that were presented in an accountable and transparent manner, giving rise to muzzaki's trust in the management of the financial reports of zakat, infaq and alms managed by Baitulmaal Muamalat.

Keywords: *Accountability, Transparency, Measurement of Financial Statements, publications.*

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PADA BAITULMAAL MUAMALAT**

Septiana Puja Riani¹, Naila Najihah²

**Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang**

septianapr@std.unissula.ac.id, naila.najihah@std.unissula.ac.id

ABSTRAK

Business Cases Report MB-KM ini yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Baitulmaal Muamalat dibuat bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Baitulmaal Muamalat yang telah disajikan. Hal itu dilakukan dengan cara mengungkapkan melalui indikator pengukuran berdasarkan aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitulmaal Muamalat menyajikan laporan keuangan sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Adapun dasar yang digunakan sebagai pengukurannya yaitu PSAK dan Undang – Undang. Namun pada laporan keuangan perlu adanya penyesuaian istilah berdasarkan aturan terbaru. Maka, diperlukan adanya update terhadap aturan baru yang berlaku untuk meminimalisir kesalahpahaman kepada stakeholder sebagai pemangku kepentingan informasi laporan keuangan. Penelitian ini menghasilkan pengungkapan laporan keuangan yang dipublikasi telah disajikan secara akuntabel dan transparan, sehingga memunculkan kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Baitulmaal Muamalat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengukuran Laporan Keuangan, Publikasi.

**LEMBAR PENGESAHAN
BUSINESS CASES REPORT MB-KM**

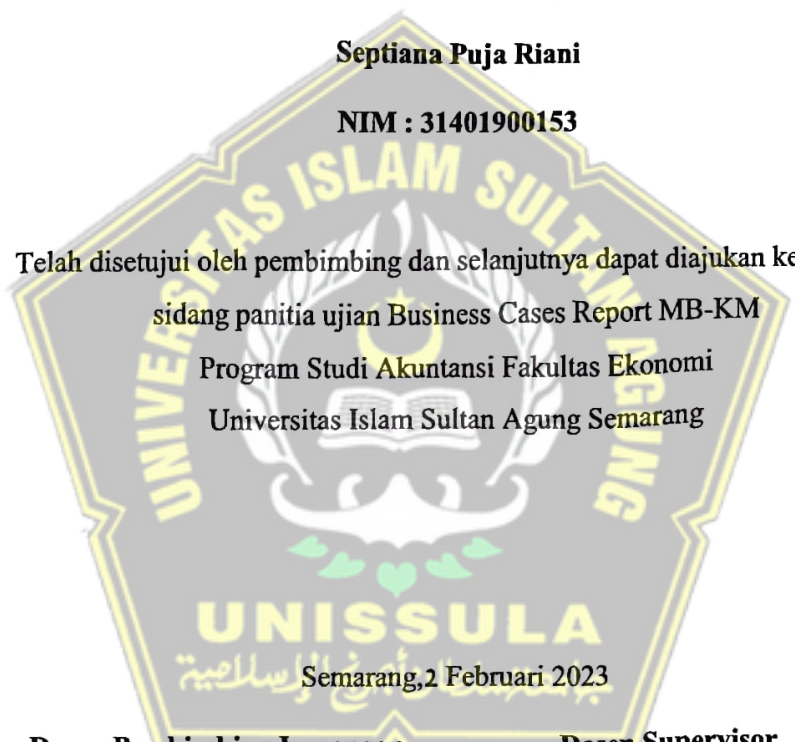
**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA
BAITULMAAL MUAMALAT**

Disusun Oleh :

Septiana Puja Riani

NIM : 31401900153

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian Business Cases Report MB-KM
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Semarang, 2 Februari 2023

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor


Naila Najihah, S.E., M.Sc.
NIK. 211418029

Niezar Moch Evannaza

BUSINESS CASES REPORT MB-KM**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA
BAITULMAAL MUAMALAT****Disusun oleh :****Septiana Puja Riani****NIM : 31401900153**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal, 2 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji**Dosen Pembimbing Lapangan****Naila Najihah, S.E., M.Sc.**
NIK. 211418029**Dosen Supervisor****Niezar Moch Evannaza****Dosen Penguji I****Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA.**
NIK.0613086401**Dosen Penguji II****Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M. Si., Ak., C.A., ASEAN CPA.,CRP.**
NIK.0608126602

Business Cases Report MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal, Februari 2023

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi****Provita Wilayanti, S.E., M.Si., Ak., CA.**
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SEPTIANA PUJA RIANI

NIM : 31401900153

JURUSAN : SI AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

Terkait *Business Cases Report MB-KM* saya yang berjudul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA BAITULMAAL MUAMALAT”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam *Business Cases Report* MB-KM ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan menjiplak dan/ atau karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat saya atau temuan orang lain yang terdapat dalam *Business Cases Report* MB-KM ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2 Februari 2023



Septiana Puja Riani

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *Business Cases Report* MB-KM yang berjudul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA BAITULMAAL MUAMALAT”.

Business Cases Report MB-KM ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya, karena telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Naila Najihah, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan *Business Cases Report* MB-KM.
4. Niezar Moch Evannaza selaku Dosen Supervisor yang telah membimbing selama penulis melaksanakan magang.

5. Bapak dan Ibu penulis beserta seluruh keluarga, penulis mengucapkan terimakasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang selalu diberikan dan tak pernah ada habisnya.
6. David Awan yang telah memberi dukungan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan *Business Cases Report* MB-KM.
7. Teman teman *accounting excellent class* 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan *Business Cases Report* MB-KM ini.
8. Teman teman magang yaitu, Ratna, Evita dan Naufal yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan *Business Cases Report* MB-KM.

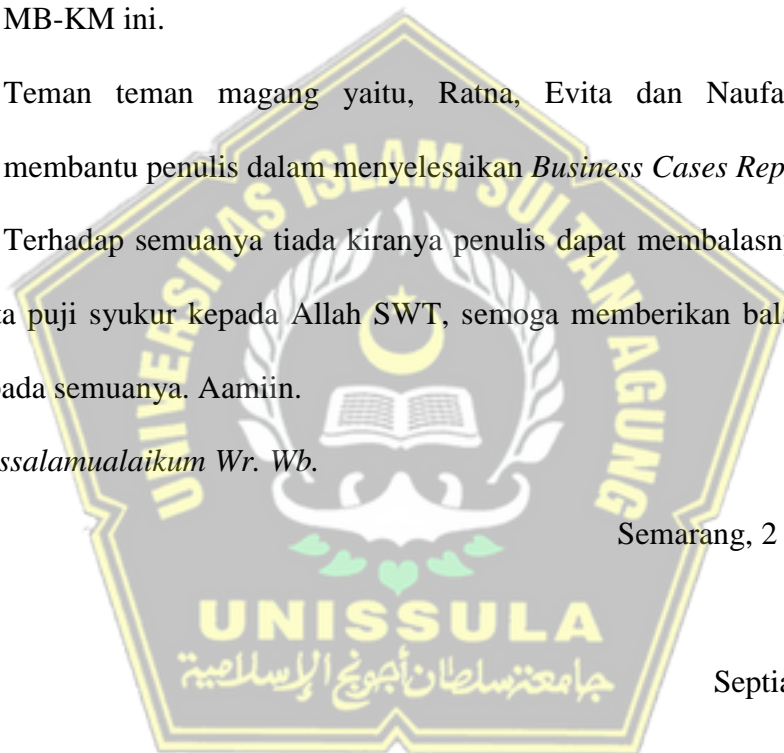
Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Februari 2023



Septiana Puja Riani



DAFTAR ISI

<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	12
2.1. Profil Organisasi	12
2.1.1. Sejarah Baitulmaal Muamalat.....	12
2.1.2. Visi dan Misi Baitulmaal Muamalat	13
2.1.3. Struktur Organisasi	15
2.1.4. Produk Unggulan Baitulmaal Muamalat.....	17

2.1.5.	Proses Bisnis dan Praktik Akuntansi.....	20
2.2.	Aktivitas Magang.....	21
2.2.1.	Bidang Kerja.....	21
2.2.2.	Pelaksanaan Kerja.....	22
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH		24
3.1.	Identifikasi Masalah.....	24
3.2.	Keterkaitan Mata Kuliah MBKM	25
BAB IV KAJIAN PUSTAKA		28
4.1.	Akuntabilitas.....	28
4.1.1.	Pengertian Akuntabilitas.....	28
4.1.2.	Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas.....	29
4.1.3.	Indikator Pengukuran Akuntabilitas	31
4.1.4.	Aspek-Aspek Akuntabilitas	36
4.1.5.	Fungsi Penting Akuntabilitas.....	37
4.1.6.	Tingkatan Akuntabilitas.....	37
4.1.7.	Mekanisme Akuntabilitas	38
4.2.	Transparansi.....	39
4.2.1.	Pengertian Transparansi	39
4.2.2.	Prinsip transparansi.....	40
4.2.3.	Pengukuran Transparansi	41
4.2.4.	Tujuan Transparansi.....	42
4.3.	Laporan Keuangan.....	42

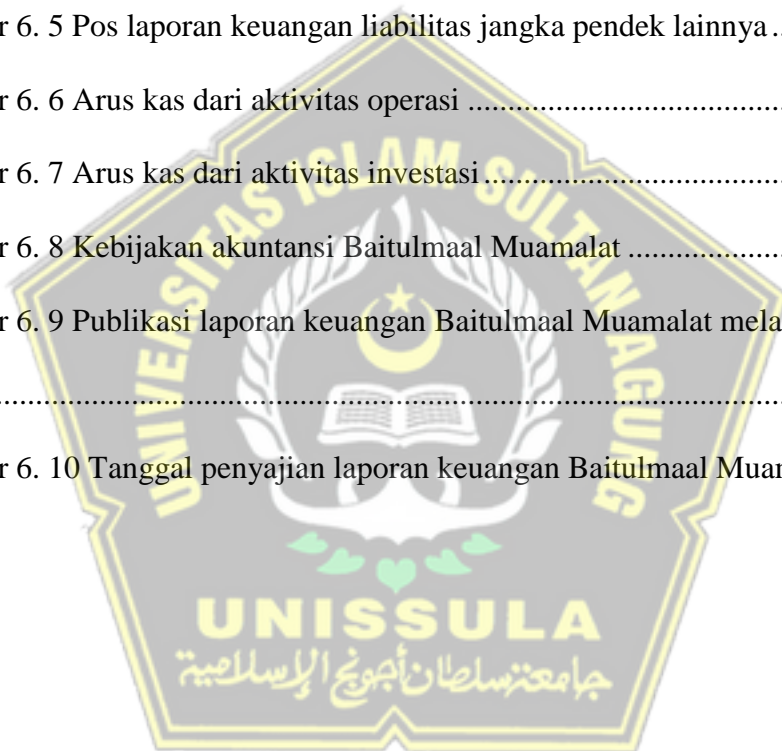
4.3.1.	Pengertian Laporan Keuangan	42
4.3.2.	Unsur Laporan Keuangan	43
4.3.3.	Akuntabilitas Laporan Keuangan.....	44
4.3.4.	Transparansi Laporan Keuangan.....	45
BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....		47
5.1.	Metode Pengumpulan Data.....	47
5.2.	Teknik Analisis Data.....	47
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		50
6.1.	Analisis Masalah.....	50
6.1.1.	Uraian Masalah	50
6.2.	Pembahasan.....	51
6.2.1.	Analisis Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat	52
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		73
7.1.	Kesimpulan	73
7.2.	Keterbatasan Penelitian.....	74
7.3.	Rekomendasi.....	74
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....		77
8.1.	Relevansi hal positif selama perkuliahan yang bermanfaat/relevan terhadap kegiatan magang.....	77
8.2.	Manfaat magang terhadap pengembangan soft-skills dan kekurangan soft-skills	77
8.3.	Manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif	78

8.4. Kunci sukses dalam bekerja.....	79
8.5. Rencana perbaikan/pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya .	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat	15
Gambar 6. 1 Komponen laporan keuangan Baitulmaal Muamalat	54
Gambar 6. 2 Tanggal penyajian laporan keuangan Baitulmaal Muamalat	56
Gambar 6. 3 Pos laporan keuangan kas dan setara kas	57
Gambar 6. 4 Pos laporan keuangan utang penyaluran	58
Gambar 6. 5 Pos laporan keuangan liabilitas jangka pendek lainnya	59
Gambar 6. 6 Arus kas dari aktivitas operasi	65
Gambar 6. 7 Arus kas dari aktivitas investasi	65
Gambar 6. 8 Kebijakan akuntansi Baitulmaal Muamalat	67
Gambar 6. 9 Publikasi laporan keuangan Baitulmaal Muamalat melalui website resmi	70
Gambar 6. 10 Tanggal penyajian laporan keuangan Baitulmaal Muamalat	71



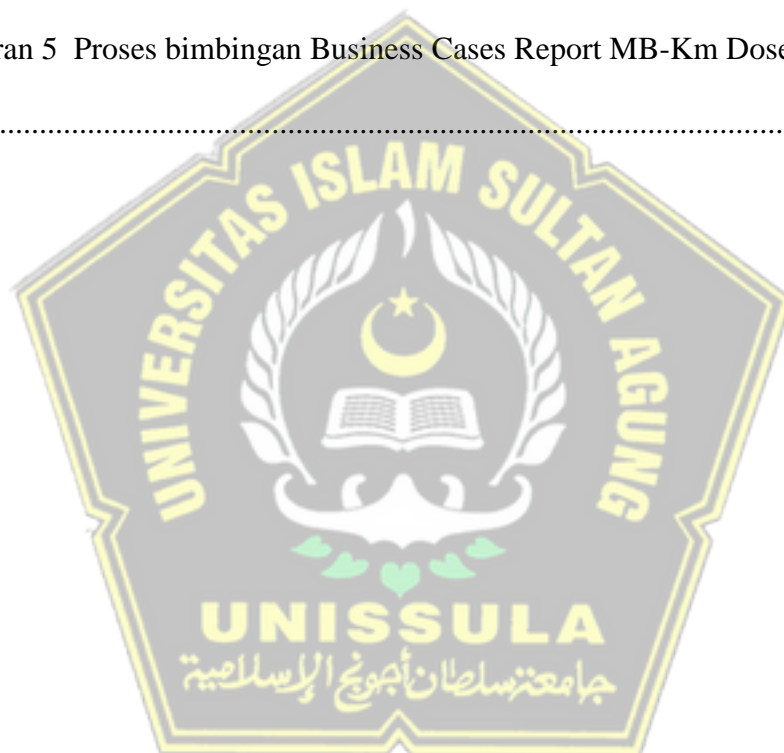
DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1 Hasil analisis Laporan Keuangan BMM tahun 2021	52
Tabel 6. 2 Penyesuaian pos-pos pada laporan posisi keuangan	61
Tabel 6. 3 Penyesuaian pos-pos pada laporan aktivitas/ laporan perubahan dana	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Identitas peserta Magang MB-KM	86
Lampiran 2 Daftar hadir peserta Magang MB-KM	87
Lampiran 3 Catatan harian (Log Book) peserta magang MB-KM	95
Lampiran 4 Proses bimbingan Business Cases Report MB-KM Dosen Pembimbing Lapangan.....	99
Lampiran 5 Proses bimbingan Business Cases Report MB-Km Dosen Supervisor	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai minat dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja sebagai langkah persiapan karier serta menjadikan mahasiswa yang berkompeten dan dapat menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Adapun bentuk dari kegiatan belajar diluar kampus yaitu terdiri dari, magang/ praktik kerja, pengabdian masyarakat, mengajar di instansi pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memiliki kebijakan pada peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang pemberian hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Selain itu berdasarkan peraturan pada (*Landasan Hukum*, n.d.) program MBKM juga memiliki landasan hukum yang menjadi aturan khusus dalam pelaksanaan program tersebut antara lain : 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, 3) Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa, 4) Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 4) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang KKNI, 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa, 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Magang MBKM adalah salah satu program Kampus Merdeka yang dirancang dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan pengembangan diri bagi mahasiswa melalui aktivitas magang yang dilaksanakan diluar perkuliahan di perguruan tinggi. Mahasiswa yang mengikuti program magang ini akan mendapatkan pengalaman kerja pada industri/ sesuai profesinya selama 1-2 semester perkuliahan. Dengan dilaksanakannya pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapat dan melatih soft skills dan hard skills untuk mempersiapkan mahasiswa untuk masuk kedalam dunia

kerja yang sebenarnya. Dengan mengikuti program magang MBKM, mahasiswa juga dituntut untuk membuat *Business Cases Report* yang disusun pasca kegiatan magang telah selesai. Dalam kegiatan magang ini laporan magang disusun berdasarkan hasil kegiatan magang dan fenomena yang telah ditemukan dalam perusahaan pada saat berjalannya kegiatan magang MBKM tersebut, kegiatan magang MBKM ini dilaksanakan di Baitulmaal Muamalat (BMM).

Baitulmaal Muamalat (BMM) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) yang didirikan pada tahun 2000 yang sudah memiliki izin dari Kementerian Agama. BMM tidak menerima dana yang bersumber dari tindak kejahatan, pencucian uang/lainnya yang melanggar ketentuan syariah. Kementerian Agama No.256/2016 sebagai LAZNAS untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSLK). BMM merupakan Nazhir resmi yang mengelola dan mengembangkan wakaf terutama wakaf produktif ekonomi. Nazhir Penerima Wakaf Uang tersebut telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia(BWI) dengan nomor 3.3.00006 yang berlaku hingga 29 Januari 2023.BMM juga merupakan suatu lembaga yang mengelola program *corporate social responsibility* (CSR) yang proaktif dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Baitulmaal Muamalat (BMM) telah melakukan tata kelola yang baik terutama dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAF dan DSKL. Guna dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim, BMM

memiliki suatu program-program yang inovatif, kreatif dan berkesinambungan dengan beberapa bidang yang berbeda beda, diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, serta kemanusiaan (Muamalat, 2019).

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat merupakan institusi pengelolaan zakat yang secara penuh dibentuk dari hasil dari gagasan masyarakat yang bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam. Tujuan dari gagasan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan.

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik dan sangat diperlukan tata kelola yang baik dalam mengatur laporan keuangan, lembaga ini dituntut untuk mewujudkan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan seperti laporan, administrasi, dan pembukuan. Transparansi adalah suatu keterbukaan atau kejujuran kepada pihak yang berkepentingan atas pengelolaan yang dilakukan, baik secara umum atau keseluruhan (Nikmahtul & Darno, 2019).

Dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan dana umat, oleh sebab itu akuntabilitas yang dibutuhkan yaitu akuntabilitas

publik. Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) sebagai bentuk pertanggungjawaban, pelaporan dan penyajian serta pengungkapan semua kegiatan. Kegiatan itu dilakukan kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*), secara langsung maupun tidak langsung. Pihak tersebut memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Alkahfi et al., 2020).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan penyaluran zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat (*muzzaki*) kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (Nurhasanah, 2018). Akan tetapi penyebab turunnya kepercayaan masyarakat juga disebabkan akibat rendahnya kesadaran masyarakat yang belum memahami kewajiban zakat dan muzakki kurang memiliki kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga amil zakat serta kebiasaan membayar zakat secara langsung (Alkahfi et al., 2020). Karena kepercayaan muzzaki merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga amil zakat, maka diperlukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemahaman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat tersebut.

Selain dari hasil survei diatas kemudian diperkuat kembali dengan dilakukannya survei oleh UIN Jakarta. Dana zakat yang memiliki

potensi besar maka muncul sebuah tuntutan akuntabilitas publik sebagaimana dibuktikan dalam survei yang dilakukan oleh UIN Jakarta dalam (Nurhasanah, 2018). Lembaga zakat dituntut untuk bekerja secara akuntabel dan transparan (97%); hal itu bertujuan untuk agar publik dapat diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut (90%); pembublikasian laporan keuangan di media massa (92%); pendataan terkait donatur zakat (88%); dan alasan mengapa masyarakat tidak mau menyalurkan zakat yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya (75%). Bahkan mereka ingin memastikan bahwa dana publik yang disalurkan memang kepada yang berhak (63%) (Nurhasanah, 2018). Tuntutan akuntabilitas publik pada Lazis yang demikian besar menarik minat banyak peneliti untuk meneliti akuntabilitas lembaga tersebut.

Peneliti tersebut di antara adalah Triyuwono dan Roekhuudin (2000) yang melakukan penelitian di sebuah Lazis di Jakarta dan menemukan bahwa akuntabilitasnya melibatkan aspek fisik, mental dan spiritual. Dari ketiga aspek tersebut merupakan pertanggungjawaban manusia secara *habluminannas* dan *habluminallah*. Sedangkan secara *habluminannas* adalah hubungan antarsesama manusia itu sendiri yang dalam hal ini melibatkan aspek fisik dan mental. Sedangkan secara *habluminallah* adalah hubungan antara manusia dengan Allah SWT yang dalam hal ini melibatkan aspek spiritual (Nurhasanah, 2018).

Untuk memperkuat kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat, maka sangat diperlukan transparansi dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat dapat dicapai dengan pelaporan yang baik sesuai dengan standar. Standar yang digunakan adalah standar dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No. 109 Tahun 2010, sehingga PSAK 109 menjadi poin penting dalam perkembangan transparansi pelaporan keuangan lembaga zakat. Selain itu sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 akan menjadi faktor peningkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat Islam, sehingga penyaluran zakat yang efektif dan sesuai akan dapat terwujud (Keuangan & Zakat, 2022).

Akuntabilitas laporan keuangan pada pengelolaan dana zakat bisa dikatakan akuntabel apabila, lembaga amil zakat dapat melakukan kegiatan administrasi dengan tertib. Selain itu, melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku (Ferarow & Suprihanto, 2018). Yang dimaksud administrasi yang baik yaitu, berupa laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Mempermudah akses untuk pihak yang membutuhkan informasi publik.

Transaparansi laporan keuangan merupakan suatu keterbukaan dan kejujuran kepada seseorang yang memiliki kepentingan terhadap data atau informasi yang berhak mereka ketahui (Nikmahtul & Darno, 2019).

Adapun prinsip transparansi yaitu, untuk menjamin adanya kebebasan akses bagi pihak yang berkepentingan (Yuliani, 2017). Diperlukannya transparansi laporan keuangan karena sebagai syarat pendukung adanya akuntabilitas atas kebijakan, aktivitas pengelolaan dana publik dan hasil yang dicapai dalam aktivitas tersebut. Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan dalam laporan keuangan, dan beberapa hal yang telah dijelaskan menjadi tolak ukur atas penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap informasi yang dipublikasikan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola laporan keuangan terhadap penyaluran dan pendistribusian dana secara akuntabel maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA BAITULMAAL MUAMALAT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas, maka terdapat suatu permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Apakah laporan keuangan Baitulmaal Muamalat sudah disajikan secara akuntabel?
2. Apakah laporan keuangan Baitulmaal Muamalat sudah disajikan secara transparan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis laporan keuangan Baitulmaal Muamalat apakah sudah disajikan secara akuntabel.
2. Menganalisis laporan keuangan Baitulmaal Muamalat apakah sudah disajikan secara transparan.

1.4. Sistematika Laporan

Dalam memperoleh gambaran umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam laporan ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat isi dari masing-masing bab dengan sistematika *Business Cases Report* MB-KM sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

1. Latar belakang permasalahan yang terdapat dalam topik yang dibahas dalam *Business Cases Report* MBKM ini.
2. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas dan diperlukan jawaban dari hasil penelitian.
3. Tujuan penelitian didapatkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan dalam laporan.
4. Sistematika laporan merupakan uraian singkat dari isi dalam bab dan sub bab yang ada dalam *Business Cases Report* MB-KM ini.

BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

1. Dalam profil organisasi menguraikan profil organisasi secara spesifik yang menjadi konteks dari topik yang dipilih dalam penelitian ini.
2. Dalam aktivitas magang terdapat uraian seluruh aktivitas yang dilakukan penulis selama magang.

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

Mengidentifikasi masalah yang muncul dan memilih beberapa masalah yang penting untuk dibahas dan dipecahkan dalam penelitian ini yang dilakukan pada perusahaan dimana dilakukannya penelitian tersebut.

BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

Menguraikan teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dipilih dan sesuai dengan topik yang telah dipilih dalam *Business Cases Report* MBKM ini.

BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

Menguraikan tentang metode apa yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang dibahas kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam analisis data,

bagaimana penulis menganalisis topik permasalahan yang dibahas dan studi analisis apa yang digunakan penulis.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

Menguraikan kembali masalah-masalah yang telah dianalisis dan melakukan pembahasan masalah yang dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

Menyimpulkan hasil kasus/masalah yang telah dianalisis dalam laporan serta memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian dan pihak-pihak instansi yang terkait dalam pelaksanaan penelitian.

BAB VIII REFLEKSI DIRI

Uraian yang terdapat dalam bab ini yaitu :

Memberikan penjabaran terkait hal-hal positif yang diterima oleh penulis selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama pelaksanaan magang MB-KM.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1. Profil Organisasi

2.1.1. Sejarah Baitulmaal Muamalat

Baitulmaal Muamalat (BMM) berdiri dan diresmikan langsung pada tanggal 16 Juni 2000 yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. Hamzah Haz dan Menteri Agama Muhammad Tolchah Hasan. Kemudian pada tahun 2001 Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) oleh Menteri Agama RI. Baitulmaal Muamalat tidak menerima dana yang bersumber dari tindak kejahatan, pencucian uang/lainnya yang melanggar ketentuan syariah. Sesuai dengan pengesahan SK dari Kementerian Agama No.256/2016 sebagai laznas dengan skala nasional sebagai lembaga yang menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSLK). Baitulmaal Muamalat merupakan pengelola (*nazhir*) resmi yang mengelola dan mengembangkan wakaf terutama wakaf produktif ekonomi. Nazhir penerima wakaf uang tersebut telah terdaftar di badan wakaf Indonesia (BWI) dengan No. 3.3.00006 yang berlaku hingga 29 Januari 2023. Baitulmaal Muamalat sebagai lembaga yang berbadan hukum yayasan yang mendapatkan akta perubahan No.4 pada 6 Agustus 2018 dan pengesahan Kemenhumkam No. AHU-AH.01.06.000253 pada tanggal 7 Agustus 2018. Baitulmaal Muamalat juga merupakan suatu lembaga yang mengelola program *corporate social responsibility* yang

proaktif dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia (*Baitulmaal Muamalat*, n.d.).

2.1.2. Visi dan Misi Baitulmaal Muamalat

VISI

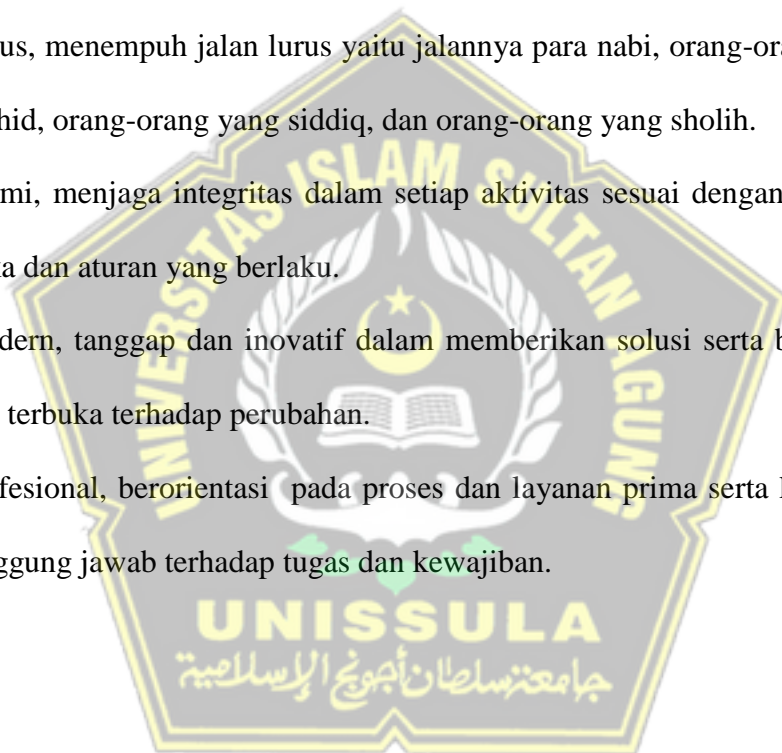
Menjadi lembaga amil zakat yang independen, profesional, dan unggul dalam memberi kemudahan muzaki berzakat secara syariah serta melayani dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

MISI

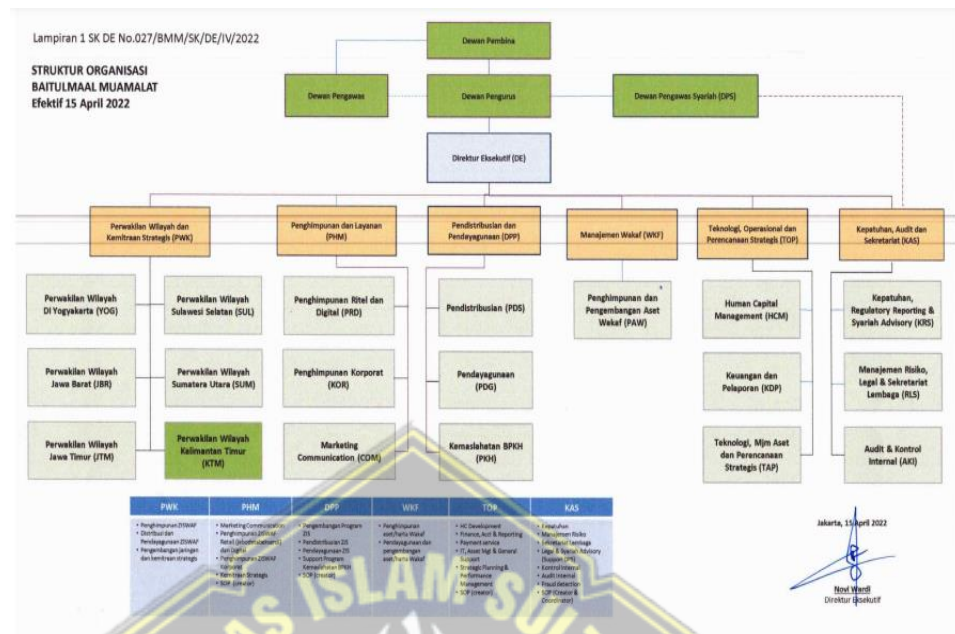
1. Mengembangkan tata kelola yang baik berbasis teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk kesinambungan tumbuh kembang lembaga.
3. Membangun aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian dan kemanfaatan lembaga.
4. Memberikan layanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan mudah dan benar sesuai syariah.
5. Mengembangkan layanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

NILAI

1. Amanah, menjaga kepercayaan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kehormatan.
2. Manfaat, selalu memberi manfaat dalam setiap pemikiran, ucapan dan perbuatan.
3. Inklusif, memberikan layanan terbaik kepada muzzaki, mustahik dan pemangku kepentingan lainnya dari berbagai kalangan.
4. Lurus, menempuh jalan lurus yaitu jalannya para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang sholih.
5. Islami, menjaga integritas dalam setiap aktivitas sesuai dengan ajaran islam, etika dan aturan yang berlaku.
6. Modern, tanggap dan inovatif dalam memberikan solusi serta berfikir positif dan terbuka terhadap perubahan.
7. Profesional, berorientasi pada proses dan layanan prima serta kompeten dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.



2.1.3. Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat

Berikut adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh bidang-bidang diatas :

1. Perwakilan wilayah dan kemitraan strategis (PWK)

- Penghimpunan ZISWAF
- Pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF
- Pengembangan jaringan dan kemitraan strategis

2. Penghimpunan dan layanan (PHM)

- Marketing communication
- Penghimpunan ZISWAF retail (daerah tertentu) dan digital
- Penghimpunan ZISWAF korporat

- Kemitraan strategis
 - SOP (creator)
3. Pendistribusian dan pendayagunaan (DPP)
- Pengembangan program ZIS
 - Pendistribusian ZIS
 - Pendayagunaan ZIS
 - Support program kemaslahatan BPKH
 - SOP (creator)
4. Manajemen wakaf (WKF)
- Penghimpunan aset/harta wakaf
 - Pendayagunaan dan pengembangan aset/harta wakaf
5. Teknologi, operasional dan perencanaan strategis (TOP)
- HC development
 - Finance, accounting and reporting
 - Payment service
 - IT, Asset Management and general support
 - Strategic planning and performance management
 - SOP (creator)
6. Kepatuhan, audit dan sekretariat (KAS)
- Kepatuhan
 - Manajemen risiko
 - Sekretariat lembaga
 - Legal & syariah Advisory (support DPS)

- Kontrol internal
- Audit internal
- Fraud detection
- SOP (creator & coordinator)

2.1.4. Produk Unggulan Baitulmaal Muamalat

BMM memiliki 3 produk unggulan dan produk tersebut berupa program kegiatan sosial. Berikut program yang dimiliki oleh BMM, antara lain :

1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan program jangka panjang (*long term*). Dalam program tersebut BMM melakukan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik guna membantu dan memakmurkan masyarakat yang membutuhkan. Adapun program jangka panjang yang ada di BMM yaitu :

a. Dusun Zakat Muamalat

Pada program dusun zakat, BMM melakukan kegiatan tersebut pada dusun binaan BMM yang digerakkan oleh *team community development* dari BMM. Program tersebut berbasis komunitas pedesaan, perkotaan dan pesisir dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan lingkungan (komprehensif dan terintegrasi).

b. BMM sahabat UKM

Pada program ini bergerak pada bidang ekonomi yaitu, BMM memberikan bantuan kepada UKM dan ditujukan kepada UKM mikro.

c. Beasiswa Sarjana Muamalat

Program ini bergerak pada bidang pendidikan pada jenjang sarjana dan difokuskan kepada mahasiswa yang sudah menjalankan semester akhir. Bantuan yang diberikan yaitu berupa uang SPP, uang saku per bulan dan pembinaan rutin bulanan. Program ini dilakukan pada jangka 2 tahun dalam setiap mahasiswa yang menerima bantuan.

d. Beasiswa Tahfizh Muamalat

Program beasiswa tahfizh muamalat ini bergerak dibidang pendidikan dan dakwah dan ditujukan kepada santri yang berkeinginan untuk menghafal Al Qur'an sehingga dapat melahirkan seorang hafizh dan hafizhah. BMM juga menargetkan dalam program ini yaitu dapat menghafal Al Qur'an sebanyak 30 Juz dalam waktu 1 tahun.

e. Beasiswa Cikal Muamalat

Program beasiswa cikal juga masih termasuk dibidang pendidikan. Dalam beasiswa cikal muamalat tingkatan yang dituju oleh BMM adalah siswa SD,SMP dan SMA. Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan uang SPP dengan target kuota 10 siswa pada setiap tingkat. Selain itu terdapat pembinaan yang akan di dampingi oleh guru pembina yang telah dipilih untuk menjadi pendamping bagi siswa yang menerima bantuan BMM.

f. MSBS (*Muamalat Solidarity Boarding School*)

Program MSBS masih dalam bidang pendidikan yang didirikan di Aceh, program ini dalam bentuk sekolah kejuruan berasrama untuk menjadikan seorang mustahik sebagai tenaga kerja yang berketrampilan dan

berkarakter islami. Ada 2 tingkatan sekolah yang didirikan yaitu SMP dan SMK dan program tersebut saat ini sudah berjalan selama 15 tahun.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan program jangka pendek (*short term*).

Dalam program tersebut BMM mendistribusikan dana zakat dari muzzaki kepada mustahik guna membantu dan memakmurkan masyarakat yang membutuhkan. Adapun program jangka pendek yang ada di BMM yaitu :

a. Komunitas Sehat BMM

Program komunitas sehat BMM adalah program berbasis komunitas atau keluarga yang termasuk dalam bidang kesehatan berupa klinik sehat muamalat dan aksi sehat muamalat. Bentuk aksi tersebut seperti, donor darah, pengobatan gratis, dsb.

b. Rumah Berkah Muamalat

Dalam program rumah berkah muamalat masih termasuk pada bidang kesehatan yaitu dengan bentuk rehabilitasi rumah yang sudah tidak layak huni.

c. Jaminan Sosial Muamalat

Pada program jaminan sosial ini termasuk kedalam bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan dan sosial lainnya seperti, pangan untuk dhuafa (PAUD), ATM beras, BPJS TK marbot, jaminan biaya hidup faqir, pelunasan tunggakan biaya sekolah, pelunasan tunggakan biaya berobat, layanan ambulance, sahabat muallaf, kegiatan *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.

d. BMM Rescue

Program BMM rescue bergerak pada bidang sosial dan kemanusiaan yaitu berupa bantuan korban bencana alam dan konflik lain terkait kegiatan kemanusiaan.

3. Wakaf

Wakaf merupakan program yang bergerak dalam kegiatan bisnis atau entrepreneur. Wakaf memanfaatkan aset dan uang yang harus bertahan dan bisa berkembang dengan dilakukan proses bisnis berbeda dengan dana zakat yang harus dihabiskan dan disalurkan. Adapun program dan bisnis yang dijalankan BMM adalah pengembangan harta wakaf produktif, berikut beberapa bisnis yang sudah dimiliki BMM yaitu :

- a. Executive Tahfizh Center
- b. Klinik Muamalat
- c. Integrated Halal Tourism
- d. BMM Wakaf alat kesehatan

2.1.5. **Proses Bisnis dan Praktik Akuntansi**

BMM merupakan lembaga amil zakat yang dimana program kegiatan yang dilakukan lebih banyak pada bidang sosial kemanusiaan, tetapi guna mempertahankan dan mengembangkan lembaga tersebut BMM melakukan suatu proses bisnis dengan menggunakan aset yang dimiliki yaitu melalui program wakaf yang ada di BMM.

Kemudian pada praktik akuntansi yang dilakukan BMM adalah, melakukan aktivitas pencatatan keuangan dalam keseharian dan 2 laporan yang berbeda yaitu, pencatatan keuangan pada zakat dan pencatatan keuangan pada wakaf.

2.2. Aktivitas Magang

2.2.1. Bidang Kerja

Selama pelaksanaan magang di Bank Muamalat Indonesia KCU Semarang, penulis ditempatkan pada bagian marketing untuk membantu back office dan tim marketing pada Bank Muamalat. Dalam pelaksanaan magang tersebut selalu dalam bimbingan dan pendampingan dari Supervisor Niezar Moch Evannaza sebagai *Relationship Manager Bussines*. Dalam menjalankan aktivitas magang, supervisor memberikan tugas-tugas antara lain :

1. Melakukan follow up kepada nasabah produk haji Bank Muamalat
2. Membantu dalam melakukan penginputan data no. Telp nasabah
3. Membantu dalam melengkapi formulir pembukaan rekening non perorangan
4. Mengadakan dan ikut berkontribusi dalam event sosialisasi produk Bank Muamalat
5. Membantu pada bagian marketing Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat.

Selain kegiatan kantor pada Bank Muamalat, penulis juga mengikuti kegiatan diluar kantor Bank Muamalat antara lain :

1. Ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan masjid binaan seperti, mengaji, buka bersama dan kultum.
2. Ikut membantu dalam mengajar ngaji pada TPQ yang ada pada masjid binaan.

2.2.2. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan magang pada Bank Muamalat KCU Semarang bisa dilakukan secara *Work From Office* (WFO) maupun *Work Form Home* (WFH).

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan WFO antara lain :

1. Penginputan data nomor telepon nasabah
2. Melengkapi formulir pembukaan rekening non perorangan
3. Kegiatan sosialisasi produk kepada calon nasabah
4. Proses marketing produk Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat

Selain pelaksanaan yang dilaksanakan secara *Work From Office* (WFO), penulis juga melaksanakan kegiatan secara *Work Form Home*(WFH) antara lain :

1. Follow up kepada nasabah produk haji Bank Muamalat
2. Proses marketing produk Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat.

Selain melakukan tugas tugas yang diberikan oleh supervisor, penulis juga mendapatkan materi antara lain :

1. Pengetahuan perbankan syariah

2. Produk-produk yang ada pada Bank Muamalat
3. Produk/ Program yang ada pada Baitulmaal Muamalat
4. Pelatihan marketing
5. Prosedur pembukaan rekening baru
6. Prosedur pendaftaran produk haji
7. Penjelasan mengenai pembiayaan haji

Pada aktivitas magang yang telah dilaksanakan diatas terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat sebagai target penilaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, adapun indikator yang yang perlu dicapai adalah :

a. Kinerja keuangan (*Financial performance*)

Melakukan kegiatan pemasaran produk berupa produk Haji tunai, Prohaji (pembiayaan haji), pembukaan rekening baru (NTB)/ Mdin

b. Kinerja non keuangan (*Non financial performance*)

Menghadiri dan melakukan pendampingan kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid yang telah bekerja sama oleh Bank Muamalat

c. Layanan dan sikap (*Services & attitude*)

Pada penilaian ini merupakan penilaian terkait individu setiap mahasiswa meliputi, kehadiran, etika dalam bekerja dan keaktifan.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1. Identifikasi Masalah

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan seperti laporan, administrasi, dan pembukuan. Sehingga sangat dibutuhkan baik untuk mencatat persamaan dasar akuntansi ataupun siklus akuntansi. Pada lembaga amil zakat, akuntabilitas laporan keuangan sangat penting dan lembaga amil zakat harus melakukan pelaporan atas hasil pengelolaan dana yang telah dikelola. Hal tersebut sudah merupakan tuntutan sebagai tata kelola yang berlaku dimasa kini dan berkaitan pada penegakan *good governance* pada lembaga tersebut.

Pengelolaan yang berkaitan dengan dana publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaporan yang disajikan pun harus mencantumkan semua rangkaian kegiatan dimulai dari, perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, keuangan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pada pengelolaan dana. Untuk memenuhi seluruh kegiatan tersebut maka diperlukan pengelolaan yang tertib dan sesuai dengan aturan undang-undang yang efektif, efisien, ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan agar pelaporan dapat disajikan secara transparan dan akuntabel (Wulaningrum & Pinanto, 2020).

Dari uraian diatas, penulis ingin melihat pada masalah yang teridentifikasi yaitu pada laporan keuangan Baitulmaal Muamalat apakah

sudah disajikan secara akuntabel dan transparan. Masalah tersebut penting untuk dibahas, karena pada masalah tersebut berpengaruh cukup besar terhadap kepercayaan muzaki kepada Baitulmaal Muamalat. Dilihat dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, sangat diperlukan solusi sebagai pemecahan masalah yang ada. Apabila masalah-masalah yang teridentifikasi tidak segera didapatkan solusi yang tepat dan cepat maka dapat muncul kemungkinan laporan keuangan atas pengelolaan dana tidak disajikan secara akuntabel dan transparan. Dengan adanya perencanaan solusi yang akan diterapkan, Baitulmaal Muamalat tidak akan kesulitan untuk mendapat muzaki dan laporan keuangan yang disajikan Baitulmaal Muamalat akan dinilai akuntabel dan transparan.

3.2. Keterkaitan Mata Kuliah MBKM

Pada laporan magang MBKM ini, identifikasi masalah dihasilkan dari perbandingan dari 5 mata kuliah MBKM, antara lain :

1. *Accounting Problem Identification*

Accounting Problem Identification adalah cara mengidentifikasi permasalahan akuntansi yang terjadi di Baitulmaal Muamalat. Dalam hal ini, identifikasi dilakukan dengan cara observasi terkait laporan keuangan yang disajikan Baitulmaal Muamalat dengan menyesuaikan prosedur aturan yang berlaku saat ini.

2. *Data Collection Management*

Data Collection Management adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan magang MBKM. Data yang diperlukan dalam laporan magang MBKM ini berupa data dokumenter laporan keuangan tahunan dari Baitulmaal Muamalat guna menunjang keberlangsungan laporan magang MBKM ini.

3. *Critical Thinking for Accounting*

Critical Thinking for Accounting adalah cara berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan akuntansi yang terjadi. Hal ini sangat diperlukan dalam perusahaan guna mengantisipasi adanya permasalahan akuntansi yang ada, terutama pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Baitulmaal Muamalat.

4. *Accounting Problem Solving*

Accounting Problem Solving adalah cara memecahkan permasalahan akuntansi pada Baitulmaal Muamalat, tentang bagaimana cara untuk mencari solusi dari permasalahan yang teridentifikasi guna memperkuat kepercayaan muzakki terhadap Baitulmaal Muamalat melalui penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

5. *Accounting Case Report*

Accounting Case Report adalah laporan mengenai permasalahan akuntansi yang teridentifikasi di Baitulmaal Muamalat. Hal tersebut mencakup tentang penulisan laporan magang MBKM, dimana acuan penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan magang MBKM ini berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1. Akuntabilitas

4.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti tanggung jawab atau situasi yang diperlukan sebuah pertanggungjawaban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “ Akuntabilitas adalah masalah tanggungjawab, situasinya bertanggungjawab”. Dalam pengertian lain akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Akuntabilitas dalam kata sifat yaitu berarti akuntabel.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), akuntabilitas adalah evaluasi mengenai proses pelaksanaan aktivitas atau kinerja sebuah organisasi/lembaga untuk dipertanggungjawabkan dan sebagai umpan balik bagi pimpinan agar kinerja organisasinya dapat meningkatkan dimasa mendatang (Azhari, Muhammad Fahmi, Teguh Yuwonor, 2022). Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus diwujudkan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas/kinerja yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau gagal dan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi yang sudah ditetapkan atau tidak.

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari amanah yang telah diberikan pada suatu lembaga (Ramdhani, 2018), sedangkan menurut Hughes akuntabilitas adalah mereka yang bertindak atas nama orang atau kelompok

lain, dengan melaporkan kembali kepada orang atau kelompok itu juga, atau bertanggungjawab atas hal tersebut dengan cara tertentu (Alkahfi et al., 2020). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah sebuah upaya atau kegiatan untuk menghasilkan sebuah pengungkapan secara benar. Pengungkapan atau pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk Allah. Akuntabilitas juga berkaitan dengan peran sosial dimana seorang akuntan(*muhtasib*) yakin bahwa pada hukum syariah sudah dilaksanakan dan kesejahteraan umat merupakan tujuan dari aktivitas lembaga dan tercapainya tujuan yang sudah direncanakan (Syafiq, 2016).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan dengan sesuai atas sebuah aktivitas/kegiatan. Aktivitas tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal tersebut digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja suatu lembaga/organisasi agar menjadi lebih baik kedepannya.

4.1.2. Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff lembaga untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen

Terdapat lima dimensi dalam akuntabilitas, antara lain :

a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Melakukan hal yang jujur dalam bekerja serta menaati aturan hukum yang berlaku maka lembaga publik harus menyajikan informasi yang akuntabel. Dalam penggunaan dana publik harus didistribusikan dengan benar dan mendapat otorisasi.

b) Akuntabilitas Manajerial

Melakukan pengelolaan lembaga secara efektif dan efisien dalam pertanggungjawaban lembaga publik. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi yang terjadi pada lembaga publik tidak boleh dibebankan kepada klien, hal tersebut sudah merupakan tanggungjawab lembaga itu sendiri.

c) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program yaitu berkaitan dengan pertimbangan atas perencanaan yang sudah dibuat. Dan lembaga tersebut harus membuat

pertanggungjawaban mengenai perencanaan tersebut sampai dengan selesai pelaksanaan program yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan organisasi/lembaga.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Dengan akuntabilitas kebijakan, lembaga memiliki tugas mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut atas dasar mempertimbangkan tujuan, resiko, sasaran yang akan muncul kedepannya.

e) Akuntabilitas Finansial

Lembaga publik melakukan pertanggungjawaban dalam menggunakan uang publik secara ekonomis, efektif, efisien, tidak melakukan pemborosan dana dan kebocoran dana serta tidak melakukan aktivitas korupsi. Dalam akuntabilitas finansial ditekankan pada besar anggaran dan finansial. Hal itu sangat penting karena pengelolaan dana publik menjadi sorotan bagi masyarakat luas.

4.1.3. Indikator Pengukuran Akuntabilitas

Dalam (Ramdhani, 2018) indikator - indikator pengukuran akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran

a) Ketaatan pada peraturan yang ada

Ketaatan pada peraturan yang ada adalah taat terhadap aturan dasar peraturan standar akuntansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Akuntansi Syariah. Peraturan standar akuntansi dapat mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pengukuran yang dilihat dengan mengacu pada PSAK 101, yaitu pada kelengkapan penyajian komponen laporan keuangan.

b) Ketaatan dalam mempublikasikan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan wajib di ungkapkan dan di publikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu setiap 6 bulan dan akhir tahun. Aturan tersebut mengacu pada PP No 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Laporan keuangan di sajikan berdasarkan fenomena/aktivitas yang terjadi dan berpengaruh pada entitas.

c) Kejujuran

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan disajikan dengan jujur, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan. Aturan dasar yang menjadi acuan yaitu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Laporan keuangan harus disajikan berdasarkan informasi dan gambaran transaksi yang benar benar terjadi serta harus disajikan secara wajar.

2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam akuntabilitas keuangan indikator yang dapat dilihat sebagai pengukuran terhadap akuntabilitas yaitu berupa komponen laporan

keuangan entitas amil, laporan keuangan dapat dikatakan lengkap apabila terdapat laporan keuangan sebagai berikut :

a) Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan yang disajikan ada beberapa pos-pos yang harus dipenuhi antara lain :

- Aset

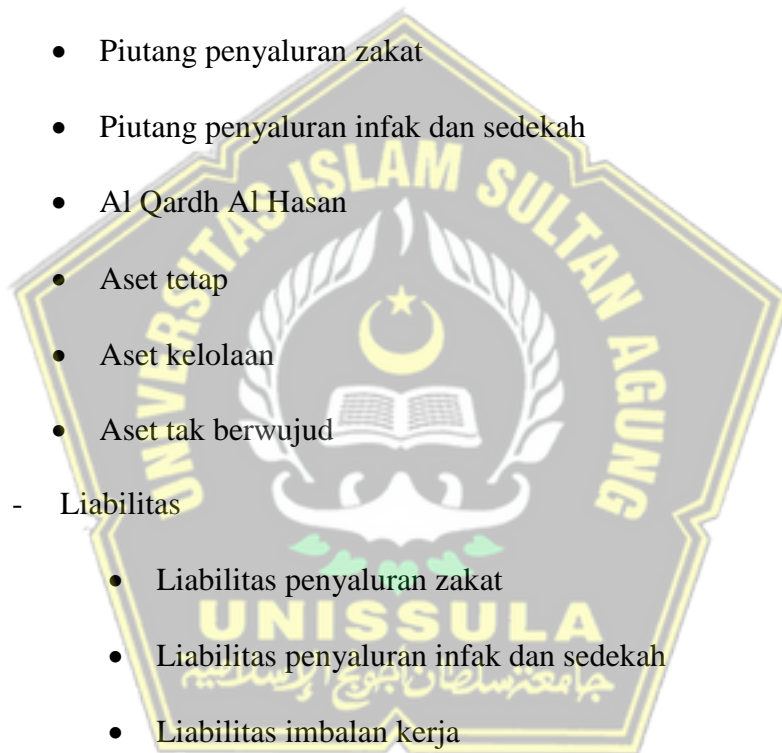
- Kas dan setara kas
- Piutang penyaluran zakat
- Piutang penyaluran infak dan sedekah
- Al Qardh Al Hasan
- Aset tetap
- Aset kelolaan
- Aset tak berwujud

- Liabilitas

- Liabilitas penyaluran zakat
- Liabilitas penyaluran infak dan sedekah
- Liabilitas imbalan kerja

- Aset neto

- Dana zakat
- Dana infak dan sedekah
- Dana amil



b) Laporan Aktivitas

Pada laporan aktivitas yang disajikan ada beberapa pos-pos yang harus dipenuhi antara lain :

1. Dana Zakat

- Penghasilan

- penerimaan zakat dari muzzaki pribadi
- penerimaan zakat dari muzzaki perusahaan
- dampak pengukuran ulang aset zakat

- Beban

- Penyaluran zakat ke amil
- Penyaluran zakat ke mustahik non amil
- saldo awal dana zakat
- saldo akhir dana zakat

2. Dana Infak dan Sedekah

- Penghasilan

- Penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah)
- Penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah)
- Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah
- Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah

- Beban
 - Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil
 - Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat
 - Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil
 - Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan penerima manfaat
 - Saldo awal dana infak dan sedekah

3. Dana Amil

- Penghasilan
 - Bagian amil dari penerimaan zakat
 - Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah
 - Penghasilan lain
- Beban
 - Beban pegawai
 - Beban lain
 - Saldo awal dana amil
 - Saldo akhir dana amil

c) Laporan Arus Kas

d) Catatan atas Laporan Keuangan

4.1.4. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Terdapat lima aspek penting yang ada dalam prinsip akuntabilitas antara lain :

a) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Hubungan yang dimaksud adalah antara individu/kelompok pada sebuah institusi dengan masyarakat dan negara. Yang bertanggung jawab dalam pemberian arahan, bimbingan dan pengalokasian biaya akan diberikan oleh pemberi kewenangan. Disisi lain, yang harus memenuhi semua kewajiban diatas adalah individu/kelompok dari institusi tersebut.

b) Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Dalam hal ini yang diharapkan adalah perlakuan dari pihak aparat yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Kemudian pada setiap individu/kelompok dituntut untuk bertanggung jawab dalam melakukan tugas, kewajiban dan memberikan upaya kontribusi untuk mencapai tujuan.

c) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

Laporan yang dibutuhkan adalah laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas. Selain itu laporan merupakan sebuah bukti nyata untuk memaparkan hasil aktivitas yang telah dilakukan.

d) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

Pertanggungjawaban merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam hal tersebut pasti muncul sebuah konsekuensi yang ditetapkan, bisa berupa sanksi ataupun penghargaan.

e) Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Tujuan dari akuntabilitas memperbaiki kinerja adalah melakukan perbaikan atas kinerja individu/kelompok pada sebuah instansi. Dalam setiap kegiatan individu/kelompok diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi kedepan guna meningkatkan kinerja untuk kedepannya.

4.1.5. Fungsi Penting Akuntabilitas

- 1) Untuk melakukan kontrol demokratis
- 2) Untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang
- 3) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

4.1.6. Tingkatan Akuntabilitas

Berdasarkan tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi lima, antara lain :

a) Akuntabilitas personal

Dalam tingkatan ini, nilai yang dicakup adalah nilai yang terdapat pada individu yaitu, kejujuran, integritas, moral, etika, dsb. Dengan memiliki prinsip akuntabilitas dalam kepribadian, itu bukanlah hal yang dapat menimbulkan masalah melainkan akan muncul sebuah solusi.

b) Akuntabilitas individu

Hal tersebut berpacu pada tanggungjawab yang diberikan dalam lingkungan pekerjaannya. Sebuah instansi pemberi kewenangan, harus bertanggungjawab untuk memberikan arahan, bimbingan dan sumber daya yang memadai serta menghilangkan hambatan kerja yang ada.

c) Akuntabilitas kelompok

Dalam tingkatan ini pekerjaan yang ada dalam sebuah instansi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan bekerja sama atau kelompok. Maka dalam kewenangan yang dilakukan dengan berkelompok akan lebih mudah untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

d) Akuntabilitas organisasi

Tingkatan ini akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan adalah laporan hasil kinerja yang telah dilakukan dan dicapai.

e) Akuntabilitas stakeholder

Dalam tingkatan ini yang dimaksud stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan dan pembayar pajak yang memiliki kewenangan untuk memberi kritik, saran dan masukan terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh organisasi yang telah membantu mereka.

4.1.7. Mekanisme Akuntabilitas

Mekanisme akuntabilitas yang diterapkan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1) Perencanaan strategis

Dalam perencanaan strategis terdapat alat akuntabilitas berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D), Rencana Kerja Pemerintah (RKP-D), dll.

2) Kinerja kontrak

Dalam kinerja kontrak terdapat alat akuntabilitas berupa kontrak kerja berisi kesepakatan antara pegawai dan atasan.

3) Laporan kinerja

Dalam laporan kinerja terdapat alat akuntabilitas berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dalamnya berisi mengenai perencanaan, perjanjian, analisis kinerja beserta laporan keuangan.

4.2. Transparansi

4.2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah suatu keterbukaan atau kejujuran kepada pihak yang berkepentingan atas apa yang seharusnya mereka ketahui, baik secara umum atau keseluruhan. Transparansi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan yang telah dilakukan dan yang sudah diamanahkan (Nikmahtul & Darno, 2019). Karena dana zakat, infak dan sedekah merupakan dana umat maka laporan keuangan atas pengelolaan zakat, infak dan sedekah juga bersifat publik. Sehingga informasi yang bersifat publik harus dilaporkan secara terbuka dan transparan, serta aksesabilitas terhadap laporan keuangan lebih mudah.

Dalam transparansi, pihak yang berkepentingan tidak hanya memiliki hak memperoleh informasi saja, melainkan memiliki hak mengetahui, mengawasi, menilai dan menganalisa kegiatan yang telah dijalankan oleh lembaga terkait (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat atau publik harus menerapkan transparansi pada pengelolaan keuangannya.

4.2.2. Prinsip transparansi

1) Informatif

Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data dan fakta kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain :

- Tepat waktu
- Memadai
- Jelas
- Akurat
- Dapat diperbandingkan
- Mudah diakses

2) Pengungkapan

Mengungkapkan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Indikator dari pengungkapan antara lain :

- Kondisi keuangan
- Susunan pengurus

- Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan

4.2.3. Pengukuran Transparansi

Berdasarkan penelitian dari (Nurhadianto & Khamisah, 2019) pengukuran transparansi laporan keuangan berdasarkan undang - undang pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diwajibkan bagi setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya yang ringan dan dengan cara sederhana, untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan yang transparan maka dapat dilihat melalui indikator dari (Ritonga & Syahrir, 2016) sebagai berikut :

1) Ketersediaan laporan keuangan

Ketersediaan laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan disajikan dan dipublikasikan melalui website resmi dari lembaga.

2) Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan yang dimaksud yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dapat diakses oleh umum termasuk pemangku kepentingan atas laporan keuangan tersebut.

3) Tepat waktu dalam mempublikasi laporan keuangan

Tepat waktu dalam mempublikasi laporan keuangan yaitu laporan keuangan disajikan dan dipublikasikan dengan tepat waktu sesuai dengan standar aturan publikasian laporan keuangan yang telah tertera pada PP No 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

4.2.4. Tujuan Transparansi

- 1) Menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan institusi/lembaga (tindakan korupsi).
- 2) Menjaga kepercayaan antara pihak yang berkepentingan dalam sebuah institusi/lembaga.

4.3. Laporan Keuangan

4.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan merupakan laporan pencatatan keuangan dan kegiatan transaksi yang bernilai ekonomi dan moneter. Menurut PSAK No. 1 (2015 : 1) “ laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Laporan keuangan biasanya dibuat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Tujuan dibuat sebuah laporan keuangan adalah untuk mengetahui keadaan finansial secara keseluruhan pada organisasi. Dengan itu stakeholder dan pengguna informasi akuntansi akan lebih mudah dalam mengevaluasi serta pemberian solusi apabila terjadi kendala/masalah pada laporan keuangan yang telah disajikan. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu masalah pada laporan keuangan, maka dalam penyusunan laporan harus dilakukan dengan cermat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pembuatan laporan keuangan sangat dibutuhkan seorang yang kompeten dibidang tersebut, yaitu seorang akuntan. Selain

membuat laporan keuangan seorang akuntan juga mempresentasikan hasil laporan keuangan secara rinci kepada para stakeholder dan dilakukan pada saat kegiatan evaluasi kinerja keuangan tahunan. Adapun tujuan dari laporan keuangan menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) adalah laporan keuangan sebagai penyedia informasi terkait posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan guna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

4.3.2. Unsur Laporan Keuangan

Ada lima bentuk laporan yang termasuk dalam unsur pada laporan keuangan yaitu :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Namun dalam PSAK No. 101 yang mengatur tentang laporan keuangan syariah disebutkan bahwa unsur/komponen laporan keuangan entitas amil zakat meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tidak seperti sebelumnya yang terdapat laporan perubahan aset kelolaan dikarenakan tidak semua entitas amil zakat menyalurkan ZIS (zakat, infak dan sedekah) dengan memalui aset kelolaan.

Terdapat perubahan terkait informasi aset kelolaan yang sekarang diungkapkan/ disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Selain itu pada PSAK No. 101 yang mengatur kinerja keuangan laporan kinerja keuangan yang berupa laporan aktivitas dengan tujuan agar konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba secara umum. Yang sebelumnya laporan tersebut diatur dalam PSAK No. 109 (2010) yang masih menggunakan istilah laporan perubahan dana.

4.3.3. Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap aktivitas organisasi. Laporan pertanggungjawaban tersebut bisa dalam bentuk laporan keuangan sebagai transparansi yang akan dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Syafiq, 2016). Lembaga amil zakat Baitulmaal Muamalat sebagai lembaga yang memiliki tugas sebagai lembaga pendistribusian dana zakat, maka sangat perlu dan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabel.

Sebuah institusi bisa dikatakan sehat ketika pengelolaan dilakukan secara transparan, akuntabel dan birokratif namun tidak kaku, apabila instansi memegang standar baku yang bermutu dan memiliki kejelasan terkait target dan sasaran yang ingin dicapai (Kusmiati, 2015). Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders atas program yang telah dilaksanakan dalam sektor publik termasuk lembaga

pendidikan, akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan organisasi (Raeni, 2014).

Dengan adanya akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga zakat akan berpengaruh pada kepercayaan kepercayaan muzzaki. Maksud dari kepercayaan muzzaki terhadap lembaga zakat yaitu kemauan muzzaki untuk mengandalkan harta yang telah dizakatkan kemudian akan disalurkan kepada mustahik dengan pertimbangan muzzaki telah yakin bahwa lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Hal itu dapat membuat seorang muzzaki berkomitmen terhadap lembaga untuk berzakat melalui lembaga amil zakat Baitulmaal Muamalat.

Pentingnya dalam mempertahankan penyajian laporan keuangan yang akuntabel adalah untuk menghindari dari banyaknya isu publik yang sensitif yang akan merusak kepercayaan muzzaki kepada lembaga amil zakat. Dengan menyajikan akuntabilitas laporan keuangan yang stabil maka akan menumbuhkan komitmen muzzaki untuk mempercayakan harta yang akan dizakati kepada lembaga tersebut.

4.3.4. Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan merupakan bentuk keterbukaan dari organisasi/lembaga dalam membuat laporan keuangan, sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat (publik) dapat mengetahui dan mengawasi dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Transparansi yang harus diketahui publik yaitu dimulai dari proses awal perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Ritonga & Syahrir, 2016). Dengan adanya transparansi laporan keuangan akan membantu dalam menciptakan sistem kontroling yang baik. Menurut (Fajri et al., 2021) dengan adanya transparansi laporan keuangan yang dilakukan organisasi/lembaga akan meningkatkan rasa kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap organisasi/lembaga. Dalam hal ini, organisasi yang bersifat publik juga harus melibatkan pihak eksternal dalam menginformasikan hasil perencanaan dan pelaksanaan yang telah dibuat oleh organisasi/lembaga secara transparan.



BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Baitulmaal Muamalat”, penulis menggunakan jenis data sekunder. Dimana data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data dokumenter dari lembaga yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber atau tempat dimana dilakukan penelitian ini berlangsung.

Dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal (*single case study*) yaitu dalam penelitian ini dilakukan studi kasus yang hanya menggunakan satu kasus yang dijadikan sebagai acuan isu. Dalam penelitian ini penulis memilih satu studi kasus karena terdapat dalam tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Baitulmaal Muamalat.

5.2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Baitulmaal Muamalat” , penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dimana analisis tersebut tidak diperlukan data yang bersifat numerik melainkan melakukan pemahaman lebih mendalam terkait data yang diperoleh dari interaksi dan sosial. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengkaji suatu masalah secara detail satu per satu untuk meyakinkan

hasil pemahaman dari masalah tersebut, karena dalam suatu permasalahan memiliki sifat yang berbeda dengan masalah yang lainnya.

Dalam proses pengkajian suatu masalah yang ada pada Baitulmaal Muamalat, penulis melakukan analisis terhadap laporan keuangan Baitulmaal Muamalat untuk melihat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut. Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan Baitulmaal Muamalat, penulis mengambil sampel laporan keuangan pada tahun 2021.

Adapun yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan untuk melihat akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan tersebut yaitu melalui beberapa pengukuran. Dalam (Ramdhani, 2018), pengukuran yang digunakan untuk menganalisis akuntabilitas laporan keuangan, yaitu :

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Didalam pengukuran tersebut terdapat indikator yang harus dipenuhi yaitu, ketaatan terhadap peraturan yang ada, ketaatan terhadap publikasian laporan keuangan, serta kejujuran.

- 2) Akuntabilitas Keuangan

Dalam pengukuran tersebut juga terdapat indikator yang harus dipenuhi antara lain, penyajian Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Indikator tersebut mengacu pada aturan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Untuk melihat laporan keuangan disajikan secara transparan, maka dapat dilihat melalui beberapa indikator pengukuran. Berdasarkan penelitian (Ritonga & Syahrir, 2016) terdapat tiga indikator pengukuran transparansi antara lain :

1) Ketersediaan laporan keuangan

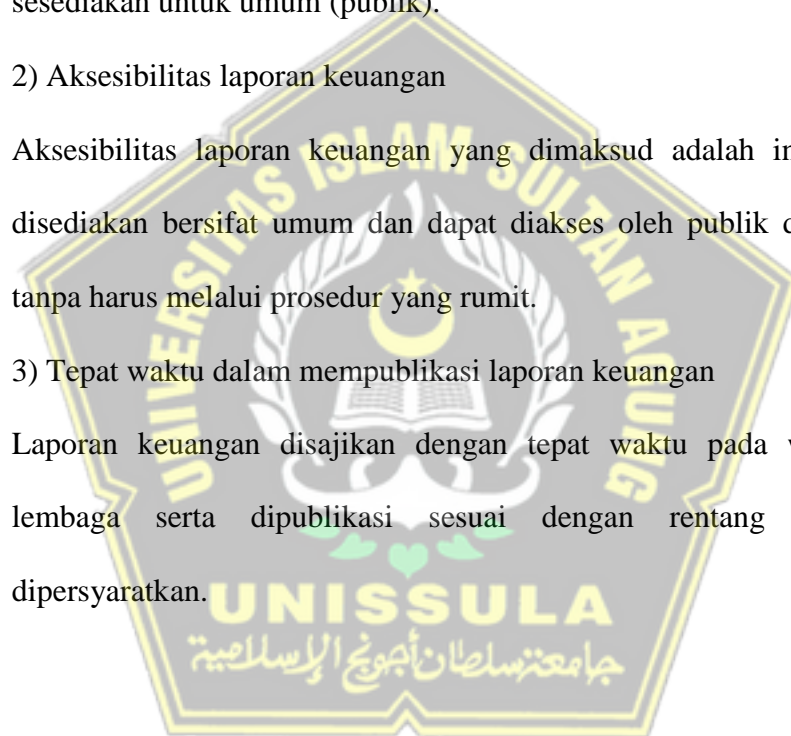
Ketersediaan laporan keuangan ini untuk menunjukkan bahwa informasi pengelolaan laporan keuangan tersedia diwebsite resmi lembaga dan sediakan untuk umum (publik).

2) Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan yang dimaksud adalah informasi yang disediakan bersifat umum dan dapat diakses oleh publik dengan mudah tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

3) Tepat waktu dalam mempublikasi laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu pada website resmi lembaga serta dipublikasi sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Masalah

6.1.1. Uraian Masalah

Masalah dalam pembahasan ini yaitu ingin membuktikan bahwa laporan keuangan Baitulmaal Muamalat yang disajikan dan dipublikasi sudah akuntabel dan transparan dengan melihat beberapa pengukuran yang telah ada. Masalah tersebut penting dibahas karena dengan adanya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan maka dapat mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Baitulmaal Muamalat.

Laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel dan transparan jika memenuhi kriteria indikator yang telah dibuat dalam peraturan yang ada. Didalam PSAK 101 yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah, mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Adapun isi dalam PSAK 101 terkait penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah yaitu, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam aturan PSAK 101 terdapat komponen laporan keuangan yang harus disajikan. Laporan keuangan Entitas Amil Zakat dapat dikatakan lengkap apabila laporan keuangan yang disajikan terdapat

laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.

6.2. Pembahasan

Hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya teknik tersebut menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan seluruh data yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat diperoleh gambaran umum dan menyeluruh.

Berdasarkan analisis, diperoleh data laporan keuangan yang disajikan oleh Baitulmaal Muamalat Tahun 2021. Adapun laporan yang diperoleh, antara lain :

- a) Laporan Posisi Keuangan Baitulmaal Muamalat Tahun 2021
- b) Laporan Perubahan Dana Baitulmaal Muamalat Tahun 2021
- c) Laporan Arus Kas Baitulmaal Muamalat Tahun 2021
- d) Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baitulmaal Muamalat Tahun 2021
- e) Catatan atas Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat Tahun 2021

Dari data-data yang telah diperoleh diatas maka dapat dilakukan analisis pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut berdasarkan indikator pengukuran yang ada.

6.2.1. Analisis Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat

Untuk melihat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh Baitulmaal Muamalat, maka dilakukan analisis untuk menyesuaikan laporan keuangan yang ada dengan indikator pengukuran yang telah disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Hasil analisis Laporan Keuangan BMM tahun 2021

		INDIKATOR		KETERANGAN	
				Memenuhi	Belum Memenuhi
Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat Tahun 2021	Akuntabilitas	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	Ketaatan pada peraturan yang ada	✓	
			Ketaatan dalam mempublikasikan Laporan Keuangan	✓	
			Kejujuran	✓	
		Akuntabilitas Keuangan	Laporan Posisi Keuangan	✓	
			Laporan Aktivitas/ laporan perubahan dana	✓	
			Laporan Arus Kas	✓	
	Transparansi		Catatan atas Laporan Keuangan	✓	
			Ketersediaan laporan keuangan	✓	
			Aksesibilitas laporan keuangan	✓	
			Tepat waktu mempublikasi laporan keuangan	✓	

A. Analisis akuntabilitas laporan keuangan Baitulmaal Muamalat

Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tahun 2021 dapat dilihat bahwa akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan pada tahun tersebut sudah dinyatakan akuntabel karena sudah memenuhi beberapa pengukuran akuntabilitas. Opini tersebut dihasilkan melalui analisis dengan pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran serta akuntabilitas keuangan.

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran memiliki indikator sebagai berikut :

- Ketaatan terhadap peraturan yang ada, yang dimaksud adalah taat pada peraturan tentang penyajian laporan keuangan yang terdapat pada PSAK 101. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Baitulmaal Muamalat telah menyajikan laporan keuangan dari tahun 2021 sesuai peraturan standar akuntansi keuangan yang ada yaitu, membuat laporan keuangan yang lengkap dengan komponen yang sesuai. Yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan Baitulmaal Muamalat sebagai berikut :

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 "Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah". Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan kecuali sebagaimana diungkapkan pada kebijakan akuntansi di bawah ini.

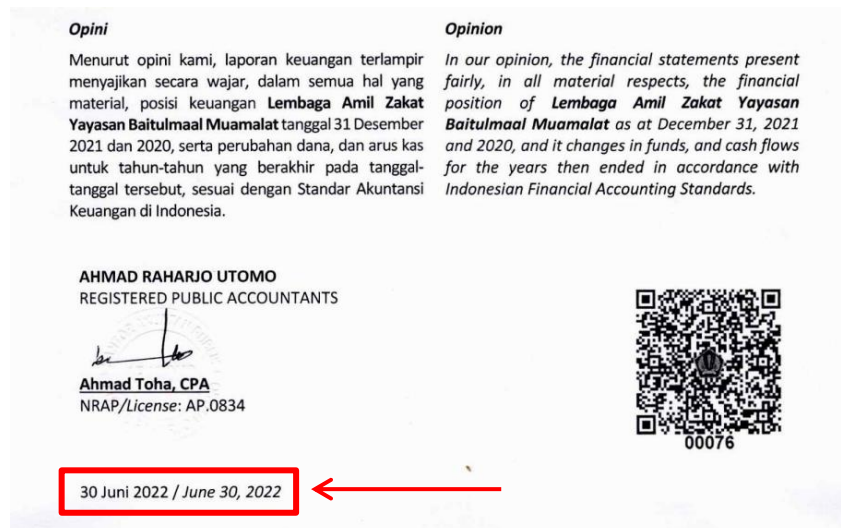
Berdasarkan PSAK No. 109, laporan keuangan lembaga amil zakat terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Gambar 6. 1 Komponen laporan keuangan Baitulmaal Muamalat

Namun pada akuntabilitas keuangan Baitulmaal Muamalat masih mengacu pada aturan PSAK 109 tahun 2010 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah, sehingga terdapat perbedaan istilah pada komponen laporan keuangan yang semula disebut dengan laporan perubahan dana kemudian saat ini telah diganti dengan istilah laporan aktivitas. Hal tersebut terdapat pada aturan PSAK 101 tahun 2021. Walaupun isi yang terdapat pada kedua laporan tersebut sama sama melaporkan transaksi dari seluruh aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat, namun hal tersebut dapat membuat pemahaman publik yang mengacu pada aturan standar akuntansi terbaru akan terkecoh dan menganggap laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai.

- Ketaatan dalam mempublikasikan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang diungkapkan dan dipublikasikan berdasarkan aturan yang terdapat pada PP No 14 tahun 2014 pasal 71 ayat 2 yaitu publikasian dilakukan dalam waktu setiap 6 bulan dan akhir tahun/ periode. Dengan estimasi waktu maksimal publikasian pada bulan Juni diperiode selanjutnya. Berdasarkan hasil analisa, Baitulmaal Muamalat telah mempublikasikan laporan keuangan tidak melebihi estimasi waktu yang telah ditetapkan, publikasi laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tahun 2021 dipublikasikan pada :

- Baitulmaal Muamalat mempublikasikan laporan keuangan tahun 2021 pada tanggal 30 Juni 2022 dan mendapatkan opini audit bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar dalam hal yang material serta perubahan dana dan arus kas untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dibuktikan dengan tanggal penyajian laporan keuangan yang telah diaudit, sebagai berikut :



Gambar 6. 2 Tanggal penyajian laporan keuangan Baitulmaal Muamalat

Dari data yang didapatkan pada laporan keuangan, Baitulmaal Muamalat telah melakukan publikasi laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan estimasi yang telah ditentukan pada PP No 14 tahun 2014 pasal 71 ayat 2. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwa Baitulmaal Muamalat telah menaati aturan publikasian laporan keuangan dan Baitulmaal Muamalat telah memenuhi indikator pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran. Hasil dari penilaian tersebut menjadi nilai tambah bagi Baitulmaal Muamalat pada pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

- Kejujuran , laporan keuangan dibuat dan disajikan berdasarkan kejujuran karena laporan keuangan dapat dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan disajikan dengan jujur, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan. Serta dalam menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan informasi dan gambaran transaksi

yang benar-benar terjadi dan harus disajikan secara wajar dengan acuan dasar pada UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Baitulmaal Muamalat sudah menyajikan laporan keuangan dengan jujur berdasarkan fenomena/aktivitas yang terjadi yaitu berupa sumber dana yang diperoleh. Dibuktikan dari laporan keuangan yang disajikan oleh Baitulmaal Muamalat, sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan bagian kas dan setara kas

2021		4. KAS DAN SETARA KAS		2021
ASET		Kas		
ASET LANCAR		Rupiah		
Kas dan setara kas	9.351.931.115	Kas Kecil		13.089.090
Piutang	923.683.756	Bank		
Biaya Dibayar Dimuka	707.722.716	Rupiah		
Jumlah Aset Lancar	10.983.337.587	PT Bank BNI Syariah		26.572.878
		PT Bank BRI Syariah		50.547.858
		PT Bank Central Asia Tbk		41.828.407
		PT Bank CIMB Niaga Tbk		40.887.391
		PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		6.746.525.195
		PT Bank Syariah Bukopin		78.635.655
		PT Bank Syariah Indonesia Tbk		378.485.280
		PT Permata Syariah		171.821.219
		Dollar		
		PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		3.538.142
		Deposito Berjangka		
		PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		1.800.000.000
		Jumlah		9.351.931.115

Nisbah bagi hasil deposito berjangka adalah sebesar 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank.

Gambar 6. 3 Pos laporan keuangan kas dan setara kas

Berdasarkan sampel pada laporan keuangan yaitu pada akun kas dan setara kas yaitu sebesar Rp. 9.351.931.115 yang dihasilkan dari beberapa sumber yaitu kas kecil, bank, dan deposito berjangka. Kemudian pada nisbah bagi hasil deposito berjangka yaitu sebesar 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank.

2. Laporan posisi keuangan bagian utang penyaluran

LIABILITAS DAN SALDO DANA		9. UTANG PENYALURAN	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			2021
Utang penyaluran	1.479.778.112	Utang Penyaluran Program Pendayagunaan	410.291.310
Liabilitas jangka pendek lainnya	674.946.975	Utang Program Pembinaan dan Pengawasan Program DBS (DP3DBS)	1.069.486.802
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.154.725.087	Jumlah	1.479.778.112
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	388.846.435		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	388.846.435		
JUMLAH LIABILITAS	2.543.571.522		

Gambar 6. 4 Pos laporan keuangan utang penyaluran

Berdasarkan sampel yang kedua, pada akun utang penyaluran program pendayagunaan sebesar Rp. 1.479.778.112 merupakan penyaluran dana zakat dari unit pengelola zakat BAZNAZ kepada LAZ BMM yang belum disalurkan dan akan disalurkan pada tahun berikutnya. Sedangkan utang DP3DBS merupakan dana kerjasama antara BMI Mengkop dan BMM sebagai pelaksanaannya dalam menyalurkannya ABPN Mengkop kepada 600 KJKS/UJKS yang sudah ditentukan melalui skema dana bergulir syariah (DBS).

3. Laporan posisi keuangan bagian liabilitas jangka pendek lainnya

LIABILITAS DAN SALDO DANA		10. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA	
		2021	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang penyaluran	1.479.778.112	Titipan Dana Penghimpunan Antar Dana	149.160.305
Liabilitas jangka pendek lainnya	674.946.975	Titipan Dana Program	457.023.954
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.154.725.087	Hak Amil yang belum dipindahbuku	64.013.878
		Utang Operasional Amil	4.748.838
LIABILITAS JANGKA PANJANG		Jumlah	674.946.975
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	388.846.435		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	388.846.435		
JUMLAH LIABILITAS	2.543.571.522		

Gambar 6. 5 Pos laporan keuangan liabilitas jangka pendek lainnya

Berdasarkan sampel pada akun liabilitas jangka pendek lainnya sebesar Rp. 674.946.975 merupakan titipan antar dana penghimpunan ZIS yang belum dipindah buku ke rekening pos ZIS yang seharusnya dan akan terhapus jika sudah tersalurkan ke masing-masing program.

Dari hasil analisa pada beberapa pos-pos laporan keuangan Baitulmaal Muamalat dapat dinilai bahwa Baitulmaal Muamalat telah memenuhi indikator pengukuran akuntabilitas kejujuran. Karena Baitulmaal Muamalat telah menyajikan seluruh aktivitasnya dan melaporkan alur keuangan beserta rincian dari pos-pos yang telah dilaporkan. Dengan itu Baitulmaal Muamalat dapat dikatakan bahwa, laporan keuangan disajikan secara terbuka dan jujur dan hal tersebut dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan atas laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tersebut.

2) Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan dari hasil analisis pengukuran akuntabilitas keuangan, Baitulmaal Muamalat telah memenuhi indikator pengukuran pada akuntabilitas keuangan dan sesuai dengan standar PSAK 101 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain komponen yang tertera dalam PSAK 101 Baitulmaal Muamalat juga mencantumkan laporan perubahan aset kelolaan. Dalam standar PSAK 101 laporan perubahan aset kelolaan tidak dijadikan komponen syarat untuk melihat akuntabilitas keuangan karena tidak semua entitas amil menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui laporan perubahan aset kelolaan dan informasi tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, Baitulmaal Muamalat telah menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan pada laporan keuangannya karena Baitulmaal Muamalat merupakan entitas amil zakat yang menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) melalui laporan perubahan aset kelolaan. Berikut indikator pengukuran akuntabilitas keuangan antara lain :

a) Laporan Posisi Keuangan

Penyajian laporan posisi keuangan pada entitas amil harus memperhatikan ketentuan PSAK dan ISAK yang relevan dengan pos – pos yang sesuai, antara lain :

Tabel 6. 2 Penyesuaian pos-pos pada laporan posisi keuangan

Psak 101	Sesuai	Tidak disajikan	Baitulmaal Muamalat
Asset			
Kas dan setara kas	✓		Kas dan setara kas
Piutang penyaluran zakat	✓		Piutang
Piutang penyaluran infak dan sedekah	✓		
Al Qardh Al Hasan		✓	-
Aset tetap	✓		Aset tetap
Aset kelolaan	✓		Aset tetap kelolaan
Aset tak berwujud		✓	-
Liabilitas			
Liabilitas penyaluran zakat	✓		Utang penyaluran
Liabilitas penyaluran infak dan sedekah	✓		Utang penyaluran
Liabilitas imbalan kerja	✓		Liabilitas imbalan pasca kerja
Aset neto			
Dana zakat	✓		Dana zakat
Dana infak dan sedekah	✓		Dana infak dan sedekah
Dana amil	✓		Dana amil

Dari hasil analisa laporan posisi keuangan diatas, pada aset Baitulmaal Muamalat telah disajikan sesuai dengan PSAK 101, namun terdapat beberapa akun yang tidak disajikan yaitu, Al Qardh Al Hasan dan aset tak berwujud. Baitulmaal Muamalat tidak menyajikan pos Al Qardh Al Hasan karena Baitulmaal Muamalat tidak memeberikan pinjaman

kepada pihak manapun. Kemudian pada aset tak berwujud, Baitulmaal Muamalat tidak memiliki aset yang tidak memiliki wujud fisik, sehingga tidak disajikan dalam laporan keuangan. Selain dari pos-pos yang disebutkan diatas, Baitulmaal Muamalat telah memenuhi syarat penyajian pos-pos pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101.

b) Laporan Aktivitas/ laporan perubahan dana

Laporan aktivitas/ laporan perubahan dana mengatur laporan kinerja entitas amil dengan tujuan supaya penyajian laporan keuangan entitas nirlaba disajikan secara konsisten. Laporan aktivitas berisi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Adapun pos-pos yang sesuai dalam PSAK 101 yaitu :

Tabel 6. 3 Penyesuaian pos-pos pada laporan aktivitas/ laporan perubahan dana

Psak 101	Sesuai	Tidak disajikan	Baitulmaal Muamalat
Dana zakat			
Penghasilan			
penerimaan zakat dari muzzaki pribadi	✓		Zakat individual
penerimaan zakat dari muzzaki perusahaan	✓		Zakat entitas
dampak pengukuran ulang aset zakat		✓	-
Beban			
penyaluran zakat ke amil	✓		Alokasi dana zakat untuk amil
Penyaluran zakat ke mustahik non amil	✓		Penyaluran dana asnaf-fakir
	✓		Penyaluran dana asnaf-fisabilillah
	✓		Penyaluran dana asnaf-gharimin

	✓		Penyaluran dana asnaf-miskin
	✓		Penyaluran dana asnaf-mualaf
saldo awal dana zakat	✓		saldo awal dana zakat
saldo akhir dana zakat	✓		saldo akhir dana zakat
Dana infak dan sedekah			
Penghasilan			
Penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah)	✓		Penerimaan dana Infak terikat
Penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah)	✓		Penerimaan dana Infak tidak terikat
Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah		✓	-
Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	✓		Bagi hasil
Beban			
Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil	✓		Penyaluran dana infak untuk amil
Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat	✓		Penyaluran dana infak dan sedekah
Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil	✓		Penyaluran dana infak untuk amil
Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan penerima manfaat	✓		Penyaluran dana infak dan sedekah
Saldo awal dana infak dan sedekah	✓		Saldo awal dana infak dan sedekah
Dana amil			
Penghasilan			
Bagian amil dari penerimaan zakat	✓		Amil dari dana zakat
Bagian amil dari penerimaan infak dan	✓		Amil dari dana infak

sedekah			
Penghasilan lain	✓		Penerimaan dana lainnya
Beban			
Beban pegawai	✓		Penyaluran dana pegawai/ pengurus
Beban lain	✓		Penggunaan lain-lain
Saldo awal dana amil	✓		Saldo awal dana amil
Saldo akhir dana amil	✓		Saldo akhir dana amil

Baitulmaal Muamalat telah memenuhi standar aturan yang ada, selain itu pada laporan aktivitas Baitulmaal Muamalat juga menyajikan dana sosial keagamaan, dana kemanusiaan, dana jasa giro dan dana kerjasama program. Namun dalam laporan aktivitas/ laporan perubahan dana ini terdapat beberapa akun yang tidak disajikan oleh Baitulmaal Muamalat yaitu pada pos dampak pengukuran ulang aset, infak dan sedekah. Hal tersebut karena pada laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tidak memiliki nilai nominal pada akun tersebut. Selain dari pos-pos yang disebutkan, Baitulmaal Muamalat telah memenuhi aturan pada PSAK 101 dengan menyajikan pos-pos sesuai dengan ketentuan yang ada.

c) Laporan Arus Kas

Berdasarkan analisis yang dilakukan, laporan arus kas yang disajikan Baitulmaal Muamalat belum memenuhi standar dari PSAK 2. Informasi yang disajikan dalam arus kas merupakan histori sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian untuk arus kas di masa depan. Laporan arus kas yang disajikan Baitulmaal Muamalat dikelompokkan berdasarkan tiga aktivitas yaitu, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

- Arus kas dari aktivitas operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan Dana		Fund Receipt	
Zakat	12.824.386.981	16.306.511.830	Zakat
Infak dan Sedekah	34.682.858.389	19.184.172.247	Infak and Sedekah
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	7.878.638.719	3.759.292.427	Others Social Religious Fund
Kemanusiaan	882.038.754	84.631.620	Humanity
Jasa Giro	642.063.933	360.282.644	Giro Service
Kerjasama Program	5.856.984.027	10.216.110.199	Program Cooperation
Bagi Hasil	35.316.889	405.865.746	Profit Sharing
Penerimaan Lainnya	155.481.689	124.878.133	Other Receipt
Jumlah Penerimaan Dana	62.957.769.381	50.441.744.845	Total Fund Receipt
Penyaluran Dana dan Beban		Disbursement Fund and Expenses	
Zakat	(13.602.941.963)	(23.814.273.331)	Zakat
Infak dan Sedekah	(30.086.550.024)	(19.993.444.341)	Infak and Sedekah
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	(5.348.420.964)	(3.791.383.553)	Others Social Religious Fund
Kemanusiaan	(469.087.549)	(1.338.136.429)	Humanity
Jasa Giro	(1.564.291.950)	(551.710.456)	Giro Service
Kerjasama Program	(6.210.510.927)	(10.599.272.114)	Program Cooperation
Biaya Operasional Amil	(6.892.710.314)	(5.809.158.685)	Profit Sharing
Biaya Administrasi Bank	(19.459.324)	(11.762.139)	Other Receipt
Penerimaan/(pembayaran) program pemberdayaan	353.648.828	(627.440.938)	Receipt -payment for empowering Program
Biaya dibayar dimuka	(696.179.991)	(11.542.725)	Prepaid expenses
Penerimaan/(pembayaran) dari dana bergulir syariah -DBS	364.510.680	732.866.388	Receipt -payment from sharia revolving fund
Investasi saham	-	3.302.123	Investment in share of stock
Penerimaan-kas dicadangkan	250.000	(706.765.413)	Receipt -Cash reserved
Aset dalam pembangunan	(2.496.280.777)	-	Assets under construction
Jumlah Penyaluran Dana dan Beban	(66.668.024.276)	(66.518.721.614)	
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(3.710.254.894)	(16.076.976.769)	Net cash flows provided by (used for) operating activities

Gambar 6. 6 Arus kas dari aktivitas operasi

Baitulmaal Muamalat telah mampu menghasilkan arus kas yang dapat membiayai seluruh kegiatannya tanpa mengandalkan sumber dana lain diluar aktivitas operasi. Adapun arus kas dari aktivitas operasi yang dihasilkan yaitu berasal dari zakat, infak dan sedekah, DSLK, kemanusiaan, jasa giro, kerjasama program, bagi hasil dan penerimaan lainnya.

- Arus kas dari aktivitas investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	
Pembelian aset kelolaan	(107.305.800)	(93.100.000)	Additional of asset under management
Penjualan aset kelolaan	104.750.000	-	Selling of asset under management
Penambahan aset tetap	(595.175.749)	(156.340.650)	Additional of property and equipment
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(597.731.549)	(249.440.650)	Net cash flows provided by (used for) investing activities

Gambar 6. 7 Arus kas dari aktivitas investasi

Baitulmaal Muamalat telah memiliki arus kas dari aktivitas investasi sebagai sumber dana untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, dari hasil perolehan dan pelepasan

aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang bukan setara kas. Adapun arus kas dari aktivitas investasi yang dihasilkan Baitulmaal Muamalat berasal dari pembelian aset kelolaan, penjualan aset kelolaan dan penambahan aset tetap.

Pada laporan keuangan arus kas diatas, Baitulmaal Muamalat telah menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi yang menjadi sumber dana dari Baitulmaal Muamalat dan sebagai evaluasi kemampuan lembaga serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun pada laporan arus kas Baitulmaal Muamalat tidak menyajikan pos arus kas dari aktivitas pendanaan, sehingga laporan arus kas Baitulmaal Muamalat belum memenuhi pengukuran transparansi pada laporan arus kas yang mengacu pada aturan PSAK 02.

d) Catatan atas Laporan Keuangan

Baitulmaal Muamalat telah menyajikan catatan atas laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar PSAK 101 yaitu, mencakup informasi dan pengungkapan-pengungkapan pada laporan keuangan. Menurut (Langsa, 2018) untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut penyajian catatan atas laporan keuangan harus memperhatikan sistematika yang berlaku. Dalam catatan atas laporan keuangan Baitulmaal Muamalat telah menyajikan sesuai dengan sistematika yang ada, dengan menyajikan dasar pengukuran kebijakan akuntansi, pertimbangan dan estimasi

akuntansi signifikan dan informasi yang mendukung dalam pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan.

- Dalam pengukuran kebijakan akuntansi Baitulmaal Muamalat telah menyajikan kelengkapan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.



Gambar 6. 8 Kebijakan akuntansi Baitulmaal Muamalat

Namun dari kebijakan Baitulmaal Muamalat yang telah disajikan pada catatan atas laporan keuangan masih mengacu pada PSAK 109 pada penyajian komponen laporan keuangan syariah. Yang sekarang telah diatur pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dengan komponen laporan keuangan yang harus disajikan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ada lagi aturan penyajian laporan perubahan aset kelolaan pada PSAK 101, karena tidak semua lembaga

syariah/ entitas amil menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui aset kelolaan. Melainkan informasi aset kelolaan dapat diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Dan pada laporan keuangan Baitulmaal Muamalat masih memakai istilah laporan perubahan dana yang mengacu pada PSAK 109 (2010) yang seharusnya saat ini sudah menggunakan istilah baru yaitu, laporan aktivitas pada laporan kinerja keuangannya. Pada PSAK 101 mengatur laporan kinerja, yang saat ini disebut laporan aktivitas dengan tujuan agar konsisten dengan penyajian laporan keuangan entitas nirlaba secara umum.

- Dalam pengukuran pertimbangan dan estimasi akuntansi signifikan memiliki poin yang harus dipenuhi yaitu, sumber dana utama dari estimasi ketidakpastian dan masa manfaat aset tetap. Pada poin-poin tersebut Baitulmaal Muamalat harus menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan estimasi akuntansi dengan kritikal tertentu yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Dalam penerapan kebijakan akuntansi yang sudah dijelaskan diatas, manajemen Baitulmaal Muamalat belum melakukan penilaian kritikal yang berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain keterlibatan pada estimasi yang berhubungan dengan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dan piutang. Kemudian pada masa manfaat aset tetap yang dimiliki Baitulmaal Muamalat, telah dilakukan estimasi sesuai

dengan periode aset digunakan. Estimasi tersebut didapatkan dari hasil evaluasi teknis internal dan pengalaman. Hal tersebut dilakukan untuk melihat hasil operasi di masa depan, apakah berpengaruh secara material karena jumlah dan waktu dari beban yang diakui.

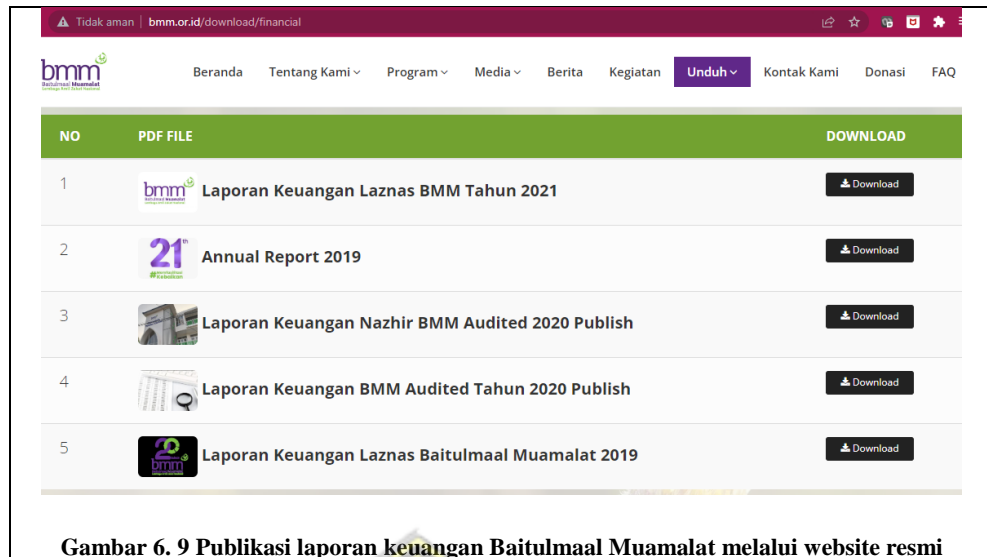
Dari poin-poin yang telah dipaparkan diatas yang didapatkan dari catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh Baitulmaal Muamalat telah mengungkapkan kelengkapan atas komponen laporan keuangan yang disajikan serta transparansi kebijakan akuntansi yang disajikan.

B. Analisis transparansi Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat Tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tahun 2021 dapat dilihat bahwa transparansi laporan keuangan yang disajikan pada tahun tersebut sudah dinyatakan transparan karena sudah memenuhi beberapa indikator pengukuran transparansi. Opini tersebut dihasilkan melalui analisis dengan pengukuran ketersediaan laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan tepat waktu mempublikasi laporan keuangan.

a. Ketersediaan laporan keuangan

Ketersediaan yang dimaksud adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasi melalui website resmi, untuk memenuhi pemangku kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Dibuktikan dari website resmi Baitulmaal Muamalat sebagai berikut :



Gambar 6. 9 Publikasi laporan keuangan Baitulmaal Muamalat melalui website resmi

Berdasarkan bukti diatas, Baitulmaal Muamalat telah mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2021 dalam website resmi Baitulmaal Muamalat (<http://bmm.or.id>). Sehingga Baitulmaal Muamalat telah memenuhi peraturan yang ada dan telah mempublikasikan laporan keuangan pada website resmi Baitulmaal Muamalat sehingga pemangku kepentingan atas laporan keuangan dapat mengetahui seluruh aktivitas keuangan pada Baitulmaal Muamalat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Baitulmaal Muamalat telah memenuhi indikator pengukuran transparansi laporan keuangan dan dapat dikatakan transparan.

b. Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan dimaksudkan adalah laporan keuangan yang telah dipublikasikan dapat diakses oleh pemangku kepentingan tanpa ada pembatasan. Baitulmaal Muamalat telah memenuhi aksesibilitas laporan keuangan karena lapran keuangan yang dipublikasikan melalui website resmi Baitulmaal Muamalat (<http://bmm.or.id>) dan dapat diakses

oleh banyak orang termasuk pemangku kepentingan atas laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tanpa adanya prosedur yang rumit.

c. Tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan

Publikasi laporan keuangan yang telah disajikan dan telah diaudit dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan aturan standar yaitu setiap 6 bulan sekali atau setiap tutup buku pada akhir tahun. Dan Baitulmaal Muamalat telah mempublikasikan laporan keuangan dengan tepat waktu yaitu sebelum batas estimasi waktu yang telah ditetapkan pada PP No 14 Tahun 2014 yaitu maksimal pada bulan Juni. Dibuktikan dari hasil publikasian laporan keuangan dari tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Laporan keuangan tahun 2021 dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 2022



Gambar 6. 10 Tanggal penyajian laporan keuangan Baitulmaal Muamalat
Berdasarkan hasil analisis data publikasi laporan keuangan dari

Baitulmaal Muamalat, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan aturan standar yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang disajikan melalui website resmi, laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik dan penyajian laporan

yang tepat waktu. Adanya bukti-bukti tersebut dapat menjadi dasar bahwa laporan keuangan Baitulmaal Muamalat bersifat transparan.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan masalah yang teridentifikasi pada laporan keuangan Baitulmaal Muamalat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Akuntabilitas Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat tahun 2021 dinilai akuntabel karena telah memenuhi indikator pengukuran akuntabilitas. Dibuktikan berdasarkan indikator pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu Baitulmaal Muamalat mengacu pada peraturan perundang – undangan serta PSAK 101 dengan menyajikan komponen laporan keuangan yang lengkap dan melaporkan rincian perolehan dana secara detail untuk memenuhi indikator kejujuran. Namun Baitulmaal Muamalat perlu memperbarui aturan yang semula mengacu pada PSAK 109, menjadi PSAK 101 agar dapat menyesuaikan isi dan istilah dari aturan terbaru saat ini.

2) Laporan keuangan Baitulmaal Muamalat tahun 2021 dikatakan transparan karena sudah memenuhi indikator pengukuran transparansi. Indikator pengukuran transparansi laporan keuangan antara lain, ketersediaan laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan tepat waktu. Beberapa indikator tersebut sangat memiliki pengaruh bagi penyajian dan publikasi laporan keuangan agar pemangku kepentingan atas laporan keuangan tersebut dapat mengetahui laporan keuangan yang

transparan dan luas. Sehingga berpengaruh kepada kepercayaan calon muzakki yang akan menyalurkan dana untuk di zakat, infak dan sedekahkan melalui Baitulmaal Muamalat. Serta aksesibilitas pada laporan keuangan mudah tanpa prosedur yang rumit.

7.2. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian pada laporan keuangan Baitulmaal Muamalat terdapat beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan dan kesulitan dalam menyimpulkan, karena pada beberapa aktivitas tidak disajikan pada laporan keuangan. Dalam penelitian ini, belum diketahui bahwa beberapa aktivitas yang tidak disajikan memang benar tidak dilaksanakan atau aktivitas tersebut telah digabungkan dalam satu akun yang lain, sehingga data yang diperoleh masih diragukan kebenarannya.

7.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman selama magang, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1) Rekomendasi hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat kelemahan pada data yang diperoleh. Untuk memperkuat hasil analisis pada pembahasan diatas, terdapat beberapa aktivitas pada laporan keuangan yang tidak bisa diungkapkan dan masih diragukan kebenarannya. Dengan ini, rekomendasi untuk peneliti yang akan datang dapat merencanakan

kerangka penelitian yang lebih detail, terutama pada metode pengumpulan dan analisis data. Penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif seharusnya dapat menggunakan data primer dan data sekunder yaitu, berupa data dokumenter dan diperkuat dengan menggunakan data hasil wawancara, agar dalam pengungkapan informasi-informasi yang tidak dipublikasikan dapat diketahui kebenarannya dan dapat diungkapkan secara utuh dan mendalam. Hal tersebut sangat diperlukan karena berpengaruh dan menjadi keterbatasan dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan.

2) Rekomendasi Tempat magang

Rekomendasi untuk tempat magang berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu, Baitulmaal Muamalat harus selalu memperbarui acuan aturan yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan syariah yaitu pada PSAK 101, agar laporan yang disajikan relevan dan informasi laporan keuangan yang disajikan jelas sesuai dengan aturan terbaru tentang penyajian laporan keuangan syariah.

3) Rekomendasi Program Studi

Rekomendasi yang diberikan pada program studi mengenai penelitian pada program magang MBKM ini yaitu, untuk kedepannya program studi dapat memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti magang sesuai dengan jurusan, sehingga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan akan lebih bermanfaat ditempat magang nantinya. Karena dalam penelitian ini mahasiswa melakukan penelitian tidak sesuai dengan

apa yang dilakukan saat magang dilaksanakan. Sehingga hasil penelitian masih memiliki kekurangan dan kelemahan terkait pengetahuan pada kondisi lapangan yang sebenarnya.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1. Relevansi hal positif selama perkuliahan yang bermanfaat/relevan terhadap kegiatan magang

Pembelajaran yang didapatkan oleh penulis selama kegiatan magang di Bank Muamalat Indonesia sangat memberikan pembelajaran dan pengalaman secara langsung pada saat kerja lapangan. Dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor selama kegiatan magang yang dilaksanakan, membuat penulis lebih bertanggung jawab.

Dalam kegiatan magang penulis dapat membandingkan dan menganalisis antara teori yang diberikan pada perkuliahan dan dengan praktik langsung dilapangan.

8.2. Manfaat magang terhadap pengembangan soft-skills dan kekurangan soft-skills

Penulis mendapatkan manfaat dalam peningkatan soft – skills selama magang. Soft – skills yang didapatkan oleh penulis selama kegiatan magang berupa skill dalam berkomunikasi dengan orang baru. Profesionalitas juga didapatkan penulis ketika mendapatkan tugas/ pekerjaan. Bahkan penulis tiak hanya melaksanakan pekerjaan yang monoton dengan satu pekerjaan, tetapi penulis juga melaksanakan beberapa pekerjaan lain yang telah diberikan oleh supervisor. Penulis juga

berusaha melaksanakan pekerjaan secara optimal dan selalu mengikuti arahan dari supervisor selama magang.

Tugas – tugas yang diberikan oleh supervisor membuat penulis dapat melaksanakan pekerjaan secara tim dengan rekan satu kelompok. Disitu penulis dan tim bergerak langsung terhadap penyelesaian masalah serta solusi yang harus dilaksanakan terhadap tugas dan permasalahan yang ada. Penulis juga ikut terlibat langsung dalam mencari audience untuk menyelenggarakan acara sosialisasi terkait pemasaran produk-produk.

Manfaat magang terhadap kekurangan soft – skills yaitu, penulis dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penulisan juga belajar untuk bisa mengambil keputusan apabila terdapat masalah pada pekerjaan yang diberikan. Dapat berinteraksi dengan staff karyawan yang lain dan aktif bertanya apabila kurang paham terhadap tugas yang diberikan.

8.3. Manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif

Manfaat dari kegiatan magang terhadap perkembangan kognitif yaitu, penulis dihadapkan dengan suatu tantangan serta target pencapaian kerja yang harus diselesaikan. Kecakapan visual, penulis bekerja dengan latihan dan terjun langsung, misalnya promosi produk/program Baitulmaal Muamalat, membantu rekan magang maupun staff, serta berkomunikasi

dengan jelas dan tidak menyinggung orang lain. Hal itu sangat penting karena dalam pekerjaan, cara berbahasa dengan baik sangat dibutuhkan guna untuk bertukar pikiran, berbagi informasi dan pengalaman.

Meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawab terhadap pekerjaan juga telah dirasakan oleh penulis. Selama kegiatan magang penulis tidak merasa putus asa terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor serta tidak menunda-nunda pekerjaan. Disamping itu penulis juga tetap berhati-hati dalam penyelesaian tugas dan menghindari kesalahan yang terjadi.

Manfaat pengembangan kekurangan kemampuan kognitif bagi penulis yaitu, meningkatkan kedisiplinan, ketelitian dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Namun beberapa kesulitan masih dirasakan oleh penulis dan tim dalam satu kelompok, tetapi dari kesulitan tersebut penulis dapat mencari solusi dan upaya bagaimana agar masalah tersebut terselesaikan. Dengan kegiatan magang ini, penulis mendapat banyak manfaat yang berguna bagi masa depan, terutama pada saat didunia kerja.

8.4. Kunci sukses dalam bekerja

Berdasarkan pengalaman magang yang telah dilaksanakan penulis selama satu semester perkuliahan, banyak hal yang didapatkan oleh penulis dan penulis dapat mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan agar dapat sukses dalam bekerja dan apa saja yang harus dipersiapkan ketika dihadapkan dunia kerja langsung di masa depan.

Berusaha menjadi Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam suatu bidang tertentu harus diperhatikan sebagai karakteristik dan keahlian yang dikuasai. Pada umumnya dalam tempat kerja memiliki banyak bagian dan posisi yang berdeda beda, disitu SDM sebagai penggerak dalam suatu bagian/departemen dan memerlukan kompetensi yang mumpuni. Selain itu nilai suatu kerja dapat dilihat dari *soft-skill* dan *hard-skill*.

Hal – hal lain yang penting untuk menjadi kunci kesuksesan adalah sikap dalam bekerja antara lain, komunikasi yang baik, tanggungjawab, disiplin, teliti, jujur, amanah, manajemen waktu serta percaya diri karna *soft-skill* sangat diperlukan dalam dunia kerja. Semua orang harus memiliki sikap kepemimpinan baik memimpin orang lain maupun diri sendiri. Seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat berfikir kritis dan cepat serta dapat mengambil keputusan untuk mengatasi suatu masalah yang ada. Kerja sama tim juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, karena semua yang dilakukan pada pekerjaan tidak mungkin dikerjakan secara individu melainkan secara berkelompok untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

8.5. Rencana perbaikan/pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya

Setelah dilaksanakannya kegiatan magang selama satu semester perkuliahan, penulis memiliki rencana ingin mengembangkan *soft-skill* dan *hard-skill* yang telah dimiliki. Bukan hanya *soft-skill* dan *hard-skill* yang perlu dikembangkan, namun *attitude* juga sangat penting untuk selalu

dijaga apalagi dalam dunia kerja yang akan bertemu dengan banyak orang baru.

Membuat rencana untuk karir dimasa depan berupa sasaran yang dituju dan manfaat dimasa yang akan datang. Membuat rencana karir dapat memotivasi penulis untuk selalu mengembangkan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki karena persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Dengan adanya pengalaman magang menjadi poin tambahan dan sarana belajar bagi penulis sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 112–126.
- Azhari, Muhammad Fahmi, Teguh Yuwonor, D. G. (2022). PENGGUNAAN APLIKASI SI D'nOK OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Journal of Politic and Government Studies*, 11.
- Baitulmaal Muamalat. (n.d.). <http://bmm.or.id/about>
- Fajri, D., Rizal, & Nofrivul. (2021). Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata a ' Yun Batusangkar. *JAKSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 12–25.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Keuangan, P. L., & Zakat, A. (2022). *SYARIAH (Revisi 2021). Revisi 2021*.

Kusmiati, M. (2015). Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: Sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 123. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1266>

Landasan Hukum. (n.d.). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/landasan-hukum>

Langsa, B. K. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa) Ayumiati. *Ayumiati Universitas*, 2(2), 35–44.

Muamalat, B. (2019). *Annual Report 2019_2022-05-15-07-47-56.pdf*. Baitulmaal Muamalat. [file:///C:/Users/puja/Downloads/Annual Report 2019_2022-05-15-07-47-56.pdf](file:///C:/Users/puja/Downloads/Annual%20Report%202019_2022-05-15-07-47-56.pdf)

Nikmahtul, M., & Darno. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Donatur Di Yayasan Sosial Keagamaan. *Jurnal Akuntansi Terapan Vol.*, 1(1), 1–8.

Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>

- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Raeni. (2014). Pengaruh Keadilan, Efisiensi, Transparan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK. *Economics Education Analysis Journal*, 3(1), 9. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- Ramdhani, D. (2018). Peran Keutamaan Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Dalam Memengaruhi Kinerja Sektor Publik Di Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4261>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Syafiq, A. (2016). Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–38.
- UU RI No. 23. (2011). *Phys. Rev. E*, 1, 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf

Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>

Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.

